

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 30 September 2020 dan untuk periode sembilan bulan yang
berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 September 2020
dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ririek Adriansyah
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Kenanga V B-6 No. 6 Taman Duta RT 002 RW 009
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukma Jaya, Depok
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Heri Supriadi
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Rancamayar No. 18 RT 001 RW 008
Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal, Bandung
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ 021 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 November 2020



Ririek Adriansyah
Direktur Utama

Heri Supriadi
Direktur Keuangan



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 DAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(TIDAK DIAUDIT)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3-4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-142

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2019 (diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2e,2u,3,33,38	17.420	18.242
Aset keuangan lancar lainnya	2e,2u,4,33,38	383	554
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang			
Pihak berelasi	2u,2ae,5,38	1.151	1.792
Pihak ketiga	33	11.570	10.005
Aset kontrak	2r,2u,2ae,6,38	822	-
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2u,38	237	292
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	7	1.026	585
Aset tersedia untuk dijual	11	39	39
Biaya kontrak	2ae,9	441	-
Pajak dibayar di muka	2t,28a	3.224	2.569
Tagihan restitusi pajak	2t,28b	804	992
Aset lancar lainnya	8,33	3.560	6.652
Jumlah Aset Lancar		<u>40.677</u>	<u>41.722</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	2u,10	2.052	1.944
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2ab,11,36	156.641	156.973
Aset hak guna	2ae,12	17.760	-
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2n,2ab,14	6.702	6.446
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,2ae,28f	2.975	2.898
Aset kontrak	2u,2ae,6,38	295	-
Biaya kontrak	2ae,9	1.312	-
Aset tidak lancar lainnya	2t,2u,13,28,33,38	4.805	11.225
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>192.542</u>	<u>179.486</u>
JUMLAH ASET		<u>233.219</u>	<u>221.208</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	2u,15,38	818	819
Pihak ketiga	33	13.766	13.078
Utang lain-lain	2u,38	520	449
Utang pajak	2t,28c	3.532	3.431
Beban yang masih harus dibayar	2u,16,33,38	13.684	13.736
Pendapatan diterima di muka - jangka pendek	2r	631	7.352
Liabilitas kontrak	17a	6.801	-
Uang muka pelanggan	2c,33	2.010	1.289
Utang bank jangka pendek	2p,2u,18a,33,38	9.515	8.705
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2m,2p,2u,2v,18b,33,38	12.209	9.510
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>63.486</u>	<u>58.369</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2t,2ae,28f	749	1.230
Pendapatan diterima di muka - jangka panjang	2r	-	803
Liabilitas kontrak	2r,2ae,17b	1.025	-
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	2s,32	1.124	1.066
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2s,31	8.522	8.078
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2m,2p,2u,2v,19,33,38	40.044	33.869
Liabilitas lainnya	2o,2u	380	543
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>51.844</u>	<u>45.589</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>115.330</u>	<u>103.958</u>
EKUITAS			
Modal saham	1c,21	4.953	4.953
Tambahan modal disetor	2w,22	2.711	2.711
Komponen ekuitas lainnya	2u,23	541	408
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	30	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		78.175	76.152
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilih entitas induk - bersih		101.717	99.561
Kepentingan non-pengendali	20	16.172	17.689
JUMLAH EKUITAS		<u>117.889</u>	<u>117.250</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>233.219</u>	<u>221.208</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PENDAPATAN	2c,2r,24,33	99.941	102.631
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2c,2r,26,33	(25.098)	(31.056)
Beban penyusutan dan amortisasi	2k,2l,2m,11,12,14	(21.038)	(17.259)
Beban karyawan	2c,2r,2s,25,33	(10.406)	(9.744)
Beban interkoneksi	2c,2r,33	(4.261)	(3.920)
Beban umum dan administrasi	2c,2r,27,33	(4.234)	(4.932)
Beban pemasaran	2c,2r,33	(2.356)	(2.949)
Rugi selisih kurs - bersih	2q	(2)	(58)
Penghasilan lain-lain - bersih	2l,2r	465	741
LABA USAHA		33.011	33.454
Penghasilan pendanaan	2c,33	644	882
Biaya pendanaan	2c,2p,2r,33	(3.457)	(3.219)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	2f,10	(136)	(3)
Rugi penurunan nilai investasi		(308)	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		29.754	31.114
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2t,2ae,28		
Pajak kini		(7.378)	(8.196)
Pajak tangguhan		575	282
		(6.803)	(7.914)
LABA PERIODE BERJALAN		22.951	23.200
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2f,2q,23	181	(61)
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2u,23	-	4
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	2f,10	-	39
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Laba (rugi) aktuarial - bersih	2s,31	-	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih		181	(18)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		23.132	23.182
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		16.679	16.459
Kepentingan nonpengendali	2b,20	6.272	6.741
		22.951	23.200
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		16.860	16.441
Kepentingan nonpengendali	2b	6.272	6.741
		23.132	23.182
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	2y,29		
Laba bersih per saham		168,37	166,15
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		16.836,89	16.614,81

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal Saham	Tambahan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih			
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo, 31 Desember 2019		4.953	2.711	408	15.337	76.152	99.561	17.689	117.250	
Dampak penerapan standar akuntansi baru	2ad	-	-	(48)	-	606	558	(50)	508	
Saldo, 1 Januari 2020		4.953	2.711	360	15.337	76.758	100.119	17.639	117.758	
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	(14)	(14)	
Dividen kas	20,30	-	-	-	-	(15.262)	(15.262)	(7.725)	(22.987)	
Laba periode berjalan	2b,20	-	-	-	-	16.679	16.679	6.272	22.951	
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,20	-	-	181	-	-	181	-	181	
Saldo, 30 September 2020		4.953	2.711	541	15.337	78.175	101.717	16.172	117.889	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal Saham	Tambahan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih			
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo, 1 Januari 2019		4.953	2.455	507	15.337	75.658	98.910	18.393	117.303	
Penambahan setoran modal anak perusahaan		-	-	-	-	-	-	59	59	
Transaksi entitas sepengendali		-	249	-	-	-	249	170	419	
Divestasi anak perusahaan		-	226	-	-	-	226	-	226	
Akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali		-	-	(3)	-	-	(3)	27	24	
Dividen kas	20,30	-	-	-	-	(16.229)	(16.229)	(8.538)	(24.767)	
Laba periode berjalan	2b,20	-	-	-	-	16.459	16.459	6.741	23.200	
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,20	-	-	(57)	-	39	(18)	-	(18)	
Saldo, 30 September 2019		4.953	2.930	447	15.337	75.927	99.594	16.852	116.446	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		96.087	98.450
Penerimaan dari restitusi pajak		2.912	-
Penerimaan dari pendapatan bunga		652	882
Pembayaran kas untuk beban		(29.152)	(43.984)
Pembayaran kas kepada karyawan		(9.832)	(9.404)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(7.625)	(6.254)
Pembayaran beban bunga		(3.541)	(3.264)
Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah		(2.065)	-
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih		(35)	1.531
Penerimaan kas lainnya - bersih		49	306
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		47.450	38.263
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Pencairan aset keuangan lancar lainnya - bersih		274	714
Hasil dari klaim asuransi	11	218	95
Hasil dari penjualan aset tetap	11	141	1.261
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	10	5	11
Pembelian aset tetap	11,40	(17.538)	(21.563)
Pembelian aset takberwujud	14,40	(1.916)	(1.424)
Penambahan penyertaan jangka panjang	10	(458)	(225)
Penurunan uang muka dan aset lainnya - bersih		(16)	(289)
Hasil dari pelepasan anak perusahaan		-	395
Akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh		-	(1.108)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(19.290)	(22.133)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	18,19	17.629	21.744
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	18,19	(19.291)	(15.422)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	30	(15.262)	(16.229)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		(7.725)	(8.538)
Pembayaran kewajiban sewa		(4.541)	-
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali		-	59
Arus kas bersih yang digunakan dari kegiatan pendanaan		(29.190)	(18.386)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(1.030)	(2.256)
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		208	(166)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	3	18.242	17.439
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3	17.420	15.017

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 21).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang melebihi batasan nilai tertentu, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 32 tanggal 21 Juni 2019. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan surat No. AHU-0032595.AH.01.02 tanggal 24 Juni 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan untuk menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif untuk mendapatkan/mengejar laba guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

- i. Usaha utama:
 - (a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- ii. Usaha penunjang:
 - (a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
 - (b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
 - (c) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPPPI") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbit uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DSAP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia 11/23/bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	839/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	844/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap tertutup	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	846/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap sambungan internasional	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	948/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	31 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	191/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/10/2016	Jasa sistem komunikasi data	31 Oktober 2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/M.KOMINFO/16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	1004/KEP/M.KOMINFO/2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan

i. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 31 tanggal 19 Juni 2020 dan No. 133 tanggal 24 Mei 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

	30 September 2020	31 Desember 2019
Komisaris Utama	Rhenald Kasali	Rhenald Kasali
Komisaris	Alex Denni	-
Komisaris	Rizal Mallarangeng	-
Komisaris	Ahmad Fikri Assegaf	-
Komisaris	Ismail	Ismail
Komisaris	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Komisaris Independen	Marsudi Wahyu Kisworo	Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen	Wawan Iriawan	Cahyana Ahmadjayadi
Komisaris Independen	Chandra Arie Setiawan	Margiyono Darsasumarja
Direktur Utama	Ririek Adriansyah	Ririek Adriansyah
Direktur Keuangan	Heri Supriadi	Harry Mozarta Zen
Direktur <i>Digital Business</i>	Muhammad Fajrin Rasyid	Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur <i>Strategic Portfolio</i>	Budi Setyawan Wijaya	Achmad Sugiarto
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Edi Witjara	Bogi Witjaksono
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Dian Rachmawan	Edwin Aristiawan
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Afriwandi	Edi Witjara
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Herlan Wijanarko	Zulhelfi Abidin
Direktur <i>Consumer Service</i>	FM Venusiana R	Siti Choiriana

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary*, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

ii. Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit

Susunan Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit Perusahaan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Ketua	Chandra Arie Setiawan	Margiyono Darsasumarja
Anggota	Marsudi Wahyu Kisworo	Tjatur Purwadi
Anggota	Wawan Iriawan	Ismail
Anggota	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Anggota	Sarimin Mietra Sardi	Sarimin Mietra Sardi
Anggota	Ahmad Fikri Assegaf	-
Anggota	Emmanuel Bambang Suyitno	-
<i>Corporate Secretary</i>	Andi Setiawan	Andi Setiawan
Internal Audit	Harry Suseno Hadisoebroto	Harry Suseno Hadisoebroto

iii. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 25.416 orang dan 24.272 orang.

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham Seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham Seri B (Catatan 21). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 30 September 2020, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatitkan pada BEI dan 40.929.645 ADS telah dicatitkan pada NYSE (Catatan 21).

Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan menerbitkan obligasi Rupiah kedua masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatitkan di BEI (Catatan 19b.i).

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatitkan di BEI (Catatan 19b.i).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2020	31 Desember 2019	30 September 2020	31 Desember 2019
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM")/ 26 Mei 1995	1995	65	65	96.900	82.730
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya/ 17 Mei 2001	1995	100	100	21.199	20.114
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	16.280	16.478
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	12.883	10.970
PT Graha Sarana Duta ("GSD"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	100	100	6.165	6.055
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	4.699	3.309
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	4.070	4.436
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	2.474	2.995
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	1.676	1.706
PT Metra-Net ("Metra-Net"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	1.325	996

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2020	31 Desember 2019	30 September 2020	31 Desember 2019
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan Network, Access Point (NAP), Voice Over Data (VOD), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2020	31 Desember 2019	30 September 2020	31 Desember 2019
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, outsourcing, dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	6.112	6.796
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., ("Telin Singapore"), Singapore	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	3.650	3.635
Telekomunikasi Indonesia International Ltd ("Telin Hong Kong"), Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	3.317	1.830
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa call center/ 22 September 1999	1984	100	100	2.317	2.626
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	2.239	2.056
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi/ 8 Januari 2013	2013	100	100	1.879	1.475
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	1.564	1.001

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2020	31 Desember 2019	30 September 2020	31 Desember 2019
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	100	100	1.076	1.146
PT Melon ("Melon"), Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	833	578
PT Persada Sokka Tama ("PST"), Jakarta, Indonesia	Penyediaan sarana prasarana jaringan telekomunikasi/ 19 Februari 2019	2008	95	95	824	870
Telekomunikasi Indonesia International ("Telin TL") S.A., Dili, Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	796	706
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN"), Petaling jaya, Malaysia	Jasa satelit/ 14 Desember 2017	1996	70	70	727	732
PT Telkomsel Mitra Inovasi ("TMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi modal/ 18 Januari 2019	2019	100	100	592	569
PT Swadharna Sarana Informatika ("SSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan ATM/ 2 April 2018	2001	51	51	567	520
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	471	395
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	292	288
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	100	100	261	272

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 September 2020	31 Desember 2019	30 September 2020	31 Desember 2019
PT Metraplasa ("Metraplasa"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	155	214
PT Nutech Integrasi ("Nutech"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia sistem integrator/ 13 Desember 2017	2001	60	60	128	177
Telekomunikasi Indonesia International Inc., ("Telkom USA"), Los Angeles, USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	111	89
Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., ("Telkom Australia"), Sydney, Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	104	86
Telekomunikasi Indonesia Intl (Malaysia) Sdn. Bhd ("Telin Malaysia"), Malaysia	Telekomunikasi/ 2 Juli 2013	2013	70	70	55	67
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	100	100	14	16

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

e. Transaksi akuisisi pada entitas anak

i. Dayamitra

PST

Pada tanggal 19 Februari 2019, Dayamitra telah mengakuisisi 95% kepemilikan langsung di PST dari Rahina Dewayani dan Rahayu berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat. Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra membeli 95% kepemilikan saham PST senilai Rp1.113 miliar dan wajib membeli sisa 5% kepemilikan saham PST dalam waktu maksimal 24 bulan sejak 8 Maret 2019, dengan harga per saham yang sama dengan akuisisi 95% saham sebelumnya. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, pada tanggal 31 Desember 2019 Dayamitra mengakui kewajiban kepada pemilik saham sebelumnya sebesar Rp80 miliar. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap persyaratan dan kondisi yang terkait dengan transaksi tersebut, disimpulkan bahwa pada tanggal akuisisi Dayamitra telah secara substantif memegang 100% kepemilikan saham PST dan dengan demikian tidak terdapat kepentingan nonpengendali.

PST adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sewa menara. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis Perusahaan. Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 30 September 2020, total pendapatan dan laba sebelum pajak yang dicatat oleh PST dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah masing-masing sebesar Rp384 miliar dan Rp97 miliar. Transaksi ini diperlakukan sebagai transaksi akuisisi bisnis kombinasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Transaksi akuisisi pada entitas anak (lanjutan)

i. Dayamitra (lanjutan)

Pembelian Menara Indosat

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Dayamitra menandatangani *Sales Purchase Agreement* ("SPA") dengan PT Indosat Tbk. ("Indosat") terkait pembelian menara milik Indosat. Hal-hal yang ditetapkan dan disepakati secara simultan dengan SPA adalah sebagai berikut:

- (a) Pengalihan kepemilikan atas 2.100 menara telekomunikasi (3.982 *tenant*) beserta perizinannya;
- (b) Pengalihan sewa tanah untuk 1.731 lokasi yang sebelumnya disewa oleh Indosat ke pihak ketiga;
- (c) Penyewaan sewa tanah untuk 369 lokasi yang dimiliki oleh Indosat; dan
- (d) Pengalihan kontrak berserta detail pengguna dengan 3.982 penyewa kolokasi yang sudah ada di menara yang diakuisisi.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Dayamitra dan Indosat telah melakukan penandatanganan *Letter Agreement (Closing Memo)*, sebagai tindak lanjut SPA yang ditandatangani oleh Indosat dan Dayamitra senilai Rp4.443 miliar.

Selain itu, disepakati juga penyewaan kembali oleh Indosat atas masing-masing 1 slot di 2.100 menara telekomunikasi yang diakuisisi oleh Dayamitra yang ditandai dengan penandatanganan *Master Tower Lease Agreement* ("MTLA"). Transaksi akuisisi ini diperlakukan sebagai transaksi akuisisi aset.

Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi untuk kedua transaksi di atas adalah sebagai berikut:

	Menara Indosat	Saham PST	Total
Aset			
Aset lancar	517	146	663
Aset tetap	3.453	634	4.087
Aset tidak lancar	-	91	91
Liabilitas	-	(610)	(610)
Nilai buku aset neto	<u>3.970</u>	<u>261</u>	<u>4.231</u>
Selisih nilai wajar dengan nilai buku aset tetap	-	398	398
Hubungan pelanggan (aset takberwujud)	473	194	667
Pajak tangguhan	-	(148)	(148)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	4.443	705	5.148
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	4.443	1.172	5.615
<i>Goodwill</i> (Catatan 14)	-	467	467

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Transaksi akuisisi pada entitas anak (lanjutan)

ii. Telkomsel

Berdasarkan akta notaris Bonardo Nasution, S.H. No. 12 tanggal 18 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan, TMI. Telkomsel menyetorkan modal awal sebesar Rp550 miliar untuk 549.989 lembar saham dari keseluruhan 550.000 lembar saham TMI yang dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2019.

TMI bergerak di bidang inovasi dan *strategic investment*. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis Perusahaan dalam rangka bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi *digital*.

f. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 4 November 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi dibawah Rp1 miliar disajikan dengan angka nol.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2021:

i. PSAK 22: Kombinasi Bisnis

Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.

ii. PSAK 73: Sewa

Amandemen ini mengatur bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 merupakan suatu modifikasi sewa dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar cara praktis tersebut dapat diterapkan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini bila Grup memiliki mayoritas atau kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah ia memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

- i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interests*).

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas ditangan, kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 2u).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- i. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu, dan
- ii. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Penyertaan Jangka Panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi provisi penurunan nilai yang dihitung berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan metodologi perhitungan estimasi tersebut berdasarkan pengalaman historis kredit tak tertagih kemudian disesuaikan dengan faktor *forward-looking* yang spesifik pada debitur terkait serta pengaruh keadaan lingkungan ekonomi. Piutang dihapuskan pada tahun ditetapkan tidak tertagih (Catatan 2u).

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen yang kemudian dibebankan pada saat pemakaian. Komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan voucher prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan, dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud, kecuali *goodwill* diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-25
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Kendaraan	4-8
Peralatan pengolahan data	3-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Aset <i>Customer Premises Equipment</i> ("CPE")	4-5
Peralatan lainnya	2-5

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual.

m. Sewa

Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan sejak 1 Januari 2020

PSAK 73 menetapkan model komprehensif untuk mengidentifikasi perjanjian sewa dan perlakuannya dalam laporan keuangan Penyewa dan Pesewa. PSAK 73 memperkenalkan model pengendalian untuk identifikasi sewa, membedakan antara sewa dan kontrak layanan berdasarkan apakah ada aset identifikasi yang dikendalikan oleh pelanggan.

Grup menerapkan PSAK 73 pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan mengakui dampak kumulatif penerapan awal PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020. Dengan demikian data komparasi tahun 2019 tidak disajikan kembali dan disajikan sesuai standar sebelumnya dan interpretasi terkait.

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak, kecuali dalam kasus dimana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73, yang antara lain:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa dimana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;
- menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya diidentifikasi berdasarkan PSAK 30R, dan tidak menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya tidak diidentifikasi berdasarkan standar ini;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

- tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- untuk tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk sewa dimana aset dasar adalah aset bernilai rendah (yaitu aset dasar dengan nilai maksimum USD5.000 atau Rp50 juta dalam kondisi baru).

PSAK 73 juga mengizinkan Grup untuk melanjutkan penilaian sewa historis yang memungkinkan Grup untuk tidak menilai kembali hasil penilaian Grup sebelumnya tentang identifikasi sewa, klasifikasi sewa dan biaya langsung awal. Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa yang dibuat atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020.

i. Grup sebagai *lessee*

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat dari aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Instalasi dan peralatan transmisi	3-25
Catu daya	3-20
Kendaraan	4-8
Lain-lain	2-25

Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Sebagai *lessee* (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan tingkat pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat suku bunga yang tersirat dalam sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan, berakhir dalam 12 bulan setelah 1 Januari 2020 dan sewa bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Sebagai *lessor*

Berdasarkan PSAK 73, lessor terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa dimana Grup mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal awal dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Grup mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada lessor oleh lessee. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh lessee dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 71, penyisihan kerugian kredit yang diharapkan telah diakui pada piutang sewa pembiayaan.

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan pendapatan PSAK 72 dari kontrak dengan pelanggan untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan hingga 31 Desember 2019

i. Sebagai *lessee*

Suatu sewa diklasifikasikan pada tanggal dimulainya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan saham ke Grup diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Sewa pembiayaan dikapitalisasi di awal periode sewa pada nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dibagi menjadi biaya keuangan dan biaya sewa. Biaya keuangan dialokasikan ke setiap periode selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Biaya keuangan tersebut diakui sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi.

Grup tidak mengubah jumlah tercatat awal aset dan liabilitas yang diakui pada tanggal penerapan awal untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (sebagai contoh aset hak guna dan liabilitas sewa sama dengan aset dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 30R). Persyaratan PSAK 73 diterapkan untuk sewa ini mulai 1 Januari 2020.

Aset sewaan disusutkan berdasarkan umur manfaatnya. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan. Pembayaran yang dibebankan dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

ii. Sebagai *lessor*

Sewa dimana Grup tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut diperoleh.

n. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang dan/atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd., dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd. yang menggunakan Ringgit Malaysia.

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	30 September 2020		31 Desember 2019	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	14.840	14.920	13.880	13.885
Dolar Australia ("AU\$") 1	10.562	10.620	9.724	9.729
Euro ("EUR") 1	17.373	17.473	15.559	15.571
Yen Jepang ("JPY") 1	140,45	141,22	127,76	127,82
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.569	3.593	3.390	3.394

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2l).

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Grup mengadopsi PSAK 72 pada 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif dari awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

Grup telah memilih untuk menerapkan pendekatan praktis berikut pada tanggal transisi:

- (i) Kontrak yang telah diselesaikan - Grup menerapkan PSAK 72 hanya untuk kontrak pelanggan yang belum selesai pada 1 Januari 2020; dan
- (ii) Modifikasi kontrak - alih-alih menerapkan pendekatan retrospektif untuk mengukur efek kumulatif dari modifikasi kontrak sejak tiap modifikasi dilakukan; Grup mengumpulkan efek dari semua modifikasi kontrak yang terjadi sebelum 1 Januari 2020 untuk:
 - (a) Mengidentifikasi kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan;
 - (b) Menentukan harga transaksi dari kontrak modifikasian terbaru; dan
 - (c) Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan pada 1 Januari 2020.

Selain itu, Grup juga memilih untuk menerapkan pendekatan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pendanaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengiriman barang atau jasa tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun, dalam mengadopsi PSAK 72.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk setiap jenis pendapatan:

i. *Mobile*

Pendapatan dari *mobile* terutama terdiri dari pendapatan dari layanan seluler yang antara lain: layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan *Short Messaging Service* ("SMS"). Layanan tersebut ditawarkan secara pascabayar atau prabayar, dimana yang untuk prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucher pengisian awal) dan voucher pengisian pulsa diakui pada awalnya sebagai kewajiban kontrak. Grup mengakui aset kontrak untuk penyediaan layanan dari pelanggan pascabayar yang belum ditagih.

Seluruh pendapatan layanan *mobile* diakui berdasarkan metode *output*, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.

Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi.

Sebagai bagian dari program pemasarannya, Grup memiliki program loyalitas pelanggan bernama "Telkomsel Poin", yang memungkinkan pelanggan untuk mengumpulkan poin untuk setiap kelipatan tertentu dari penggunaan layanan telekomunikasi. Poin dapat ditukarkan di masa depan dengan produk atau layanan gratis atau diskon, selama syarat kualifikasi lainnya tercapai.

Pembayaran yang diterima dialokasikan antara layanan telekomunikasi dan poin yang dikeluarkan, dimana pembayaran dialokasikan ke poin yang setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin ditentukan berdasarkan informasi historis terkait dengan tingkat penebusan poin penghargaan. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat poin tersebut ditebus atau telah kedaluwarsa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

ii. *Consumer*

Pendapatan dari *consumer* terutama terdiri dari pendapatan dari telepon tidak bergerak dan layanan Indihome. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak. Sedangkan pendapatan dari layanan Indihome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk ritel. Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan.

Seluruh layanan *consumer* diakui menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu jika layanan yang dijual berbasis paket ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Grup memiliki paket layanan bundel bernama "Indihome". Dalam paket ini, pelanggan dapat berlangganan kombinasi layanan *consumer* (misalnya telepon, data dan internet, serta TV berbayar). Sebelum tahun 2018, Grup mengalokasikan total harga kontrak untuk kewajiban pelaksanaan yang berbeda berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri dari setiap kewajiban pelaksanaan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan dasar yang berdiri sendiri. Mulai tahun 2019, layanan yang dibundel ini disajikan di bawah item pendapatan "Indihome" dalam catatan atas laporan keuangan (Catatan 24) sehingga lebih merepresentasikan layanan yang diberikan kepada pelanggan.

Pelanggan mungkin diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli. Grup menilai opsi pembaruan sebesar pembayaran yang diterima dari biaya di muka untuk layanan instalasi. Grup menanggukkan nilai tersebut dan mengakuinya sebagai pendapatan berdasarkan metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Grup memperkirakan jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iii. *Enterprise*

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* terutama terdiri dari pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya (misal penjualan periferal, *manage service*, *call center*, *e-health*, *e-payment*, dan lain-lain). Beberapa kontrak dengan pelanggan perusahaan dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan.

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu jika penyediaan layanan tidak tergantung pada penggunaan (yaitu menit suara, *kilobyte data*, dan lain-lain), kecuali untuk penjualan barang yang diakui pada waktu tertentu, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup. Pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan, biasanya ketika pelanggan memiliki fisik barang.

Beberapa perjanjian dengan pelanggan *enterprise* ditawarkan sebagai produk bundel. Untuk pengaturan yang dibundel, produk dan/atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. Total pembayaran dialokasikan untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda yang telah dimasukkan dalam kontrak, berdasarkan harga jualnya yang berdiri sendiri. Harga jual yang berdiri sendiri ditentukan berdasarkan harga yang dapat diobservasi di mana produk dan/atau jasa individual dijual secara terpisah, disesuaikan dengan kondisi pasar dan diskon normal yang sesuai. Atau, ketika harga yang dapat diobservasi tidak tersedia, biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin digunakan untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

iii. *Enterprise* (lanjutan)

Kontrak tertentu dengan pelanggan *enterprise* dapat menimbulkan imbalan variabel karena harga kontrak tergantung pada peristiwa di masa mendatang (misalnya kontrak berbasis penggunaan atau kontrak berbasis bagi hasil). Dalam memperkirakan imbalan variabel ini, Grup diharuskan untuk menggunakan metode nilai yang diharapkan atau metode jumlah yang paling mungkin berdasarkan metode yang lebih baik memprediksi jumlah pembayaran yang menjadi haknya. Grup menentukan bahwa metode nilai yang paling diharapkan adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam memperkirakan imbalan variabel untuk satu kontrak dengan sejumlah besar kemungkinan hasil.

Sebelum memasukkan jumlah imbalan variabel dalam harga transaksi, Grup mempertimbangkan apakah jumlah imbalan variabel dibatasi. Grup menentukan bahwa taksiran imbalan variabel tidak dibatasi berdasarkan pengalaman historisnya, estimasi bisnis, dan kondisi ekonomi saat ini dan hanya mencakup imbalan variabel sepanjang kemungkinan besar pembalikan signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalan variabel selanjutnya diselesaikan.

Ketika pihak lain terlibat dalam menyediakan produk dan/atau jasa kepada pelanggan, Grup bertindak sebagai prinsipal jika Grup mengendalikan produk dan/atau jasa yang ditentukan sebelum produk dan/atau jasa tersebut ditransfer ke pelanggan. Pendapatan dicatat pada jumlah bersih yang diterima (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok), ketika, pada dasarnya, Grup telah bertindak sebagai agen dan mendapat komisi dari pemasok produk dan/atau jasa yang dijual.

iv. *Wholesale and International Business Services* ("WIB")

Pendapatan dari WIB terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk) dan panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit) dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode *output* menggunakan basis *traffic* aktual yang tercatat untuk bulan tersebut.

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk atau jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya.

Pendapatan dari sumber lain

Pendapatan dari sumber lain terdiri dari pendapatan dari sewa menara telekomunikasi dan sewa lainnya. Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Kebijakan akuntansi untuk pendapatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019

i. Pendapatan telepon selular

Pendapatan dari jasa pascabayar, yang terdiri dari pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- (a) Pendapatan pulsa dan pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- (b) Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM dan voucher perdana) dan voucher isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada voucher prabayar telah habis masa berlakunya.

ii. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iii. Pendapatan Indihome

Pendapatan Indihome berasal dari pelanggan *consumer* yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk *retail*. Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan dan pendapatan diakui secara bulanan sesuai tagihan paket Indihome.

Penerimaan dari instalasi sambungan Indihome ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iv. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup (*transit*).

v. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

vi. Pendapatan jaringan

Pendapatan jaringan terdiri dari pendapatan sewa sirkit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vii. Pendapatan lainnya

Pendapatan dari penjualan periferal atau perangkat telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa menara telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

viii. *Multiple-element arrangements*

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan di atas.

ix. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

x. Program loyalitas pelanggan

Grup melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu atas pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditanggung dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya.

xi. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- (a) ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- (b) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

t. Pajak

Pajak penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT Tahunan") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pemeriksaan pajak

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Perubahan dikarenakan kesalahan akan disajikan berdasarkan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak (lanjutan)

Pajak tangguhan

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku terhadap penghasilan kena pajak ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Pajak tangguhan suatu transaksi diakui diluar laba rugi, diakui di luar laba rugi. Oleh karena itu, pajak tangguhan atas transaksi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau diakui langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Otoritas Pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk dipulihkan atau diselesaikan.

Pajak pertambahan nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN

Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan, pengukurannya sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak (lanjutan)

Pajak final

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - bersih".

u. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Grup mengadopsi PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam empat kategori:

(a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, dan aset tidak lancar lainnya.

(b) Aset keuangan diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan.
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 30 September 2020.

(c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Tidak ada investasi ekuitas yang diklasifikasikan dalam kategori ini per tanggal 30 September 2020.

(d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi *SPPI testing* diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

(d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Aset keuangan Grup diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari investasi pada ekuitas, penyertaan jangka panjang lainnya, reksadana, dan obligasi konversi.

Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL")

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah menggunakan semua informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Instrumen utang Grup yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari obligasi dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Lembaga Pemeringkat Kredit dan, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi risiko kredit yang rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian pada instrumen tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Namun, ketika ada peningkatan signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihannya akan sepanjang umurnya. Grup menggunakan peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL") (lanjutan)

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyesihan.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(b) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

(b) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 19 Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Lainnya.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- (i) situasi bisnis yang normal;
- (ii) peristiwa *default*; dan
- (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

iv. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Akuntansi lindung nilai

Grup tidak menerapkan akuntansi lindung nilai.

Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Grup termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha dan piutang lain-lain, aset keuangan tidak lancar lainnya dan penyertaan tersedia untuk dijual.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai penghasilan (beban) lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut.

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha dan piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (piutang usaha jangka panjang dan kas yang dibatasi penggunaannya).

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif.

(c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh Grup sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

(d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari reksadana, obligasi korporasi dan negara, dan modal saham yang dicatat sebagai "Aset keuangan lancar lainnya" dan "Penyertaan jangka panjang" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

(d) Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale investment*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("*loss event*") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara andal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, Grup terlebih dahulu menilai apakah penurunan nilai terjadi secara individual untuk aset keuangan yang secara individu memang signifikan, atau secara gabungan apabila aset keuangan tersebut secara individu tidak signifikan. Jika Grup tidak menemukan bukti yang objektif atas penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individu, terlepas apakah signifikan maupun tidak, aset keuangan tersebut dimasukkan dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tidak diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (diluar rugi kredit yang diperkirakan muncul di masa depan yang belum terjadi saat ini). Arus kas masa depan ini didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset berkurang melalui penggunaan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi atau grup investasi mengalami penurunan nilai. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain konsolidasian dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain konsolidasian diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

(a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

(b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- (a) situasi bisnis yang normal;
- (b) peristiwa kegagalan; dan
- (c) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan)

v. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Grup diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui pada laporan laba rugi sebagai beban penerbitan sukuk.

Sukuk Ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

w. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahkan Modal Disetor".

x. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

y. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

z. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

ab. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi konsolidasian.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menanggihkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

PSAK 71

Grup telah menerapkan PSAK 71 dengan pendekatan modifikasi retrospektif pada tanggal efektif yang disyaratkan, 1 Januari 2020. Saldo awal 2020 telah disesuaikan, tetapi periode sebelumnya tidak disajikan kembali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Grup meliputi:

(a) Klasifikasi dan pengukuran

Berdasarkan PSAK 71, Grup mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi, dan diukur dengan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Sebelumnya berdasarkan PSAK 55 (2013), diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini didasarkan pada dua kriteria: model bisnis Grup untuk mengelola aset; dan apakah arus kas kontraktual instrumen hanya terkait pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terhutang.

Penilaian model bisnis Grup dilakukan pada tanggal implementasi awal, 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset-aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum 1 Januari 2020. Penilaian apakah arus kas kontraktual pada instrumen utang hanya atas pembayaran pokok dan bunga dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan pada saat pengakuan awal aset.

Persyaratan klasifikasi dan pengukuran PSAK 71 berdampak pada beberapa aset keuangan Grup yang tersedia untuk dijual karena harus diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi karena arus kas kontraktual instrumen tidak hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga. Grup mengukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk semua aset keuangan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang berdasarkan PSAK 55 (2013).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

(a) Klasifikasi dan pengukuran (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 55 pada tanggal aplikasi awal, 1 Januari 2020:

	Pengukuran berdasarkan kategori PSAK 55	Pengukuran berdasarkan kategori PSAK 71
Kas dan setara kas	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi
Piutang usaha	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi
Obligasi konversi	Aset tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui laba rugi
Instrumen utang	Aset tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Investasi pada ekuitas	Aset tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui laba rugi

(b) Penurunan Nilai

Penerapan PSAK 71 secara fundamental telah mengubah akuntansi Grup untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan penurunan nilai dalam PSAK 55 (2013) dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian ("ECL"). PSAK 71 mengharuskan Grup untuk mengakui penyisihan ECL untuk semua instrumen utang selain dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset kontrak.

PSAK 72

Grup telah mengimplementasikan PSAK 72 sejak 1 Januari 2020 menggunakan pendekatan retrospektif dimodifikasi, yang berarti Grup yang dipilih untuk tidak menyajikan kembali angka perbandingan tetapi penyesuaian terhadap jumlah tercatat pada tanggal transisi diakui dalam saldo awal dari saldo laba dan kepentingan non-pengendali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Grup meliputi:

- Berdasarkan PSAK 72, aset kontrak dan liabilitas kontrak disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Sebelumnya, aset kontrak dilaporkan sebagai piutang usaha dan liabilitas kontrak dilaporkan sebagai pendapatan diterima di muka.
- Biaya kontrak yang terdiri dari biaya untuk memperoleh dan memenuhi kontrak disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Sebelumnya, biaya kontrak ini dibebankan pada saat terjadinya atau diamortisasi dengan dasar sistematis yang tidak konsisten dengan pengakuan pendapatan terkait.
- Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang diukur berdasarkan PSAK 72 disajikan secara terpisah dari pendapatan dari sumber lain.

Pada tanggal transisi PSAK 72, implementasi imbalan variable dan waktu pengakuan pendapatan menyebabkan Grup mengakui kenaikan laba ditahan sebesar pendapatan yang diakui atas kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan berdasarkan PSAK 72, hal ini karena pendapatan yang diakui lebih besar dari standar sebelumnya. Grup mengakui aset kontrak sebagai hak Grup atas imbalan kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan. Aset kontrak selanjutnya direklasifikasi sebagai utang usaha ketika seluruh kewajiban atas imbalan telah diselesaikan.

Grup juga mengkapitalisasi biaya inkremental untuk memperoleh dan memenuhi kontrak dengan pelanggan. Berbeda dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Grup untuk mengeluarkan biaya-biaya ini pada saat terjadi, biaya kontrak dikapitalisasi dan diamortisasi secara konsisten seiring dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan biaya kontrak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

PSAK 73

Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan modifikasi retrospektif pada tanggal efektif yang disyaratkan, 1 Januari 2020. Saldo pembukaan 2020 telah disesuaikan, tetapi periode sebelumnya tidak disajikan kembali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Grup meliputi:

a. Aset hak guna dan liabilitas sewa

Penerapan PSAK 73 menghasilkan pembayaran sewa minimum Grup di masa depan berdasarkan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk diakui sebagai liabilitas sewa guna usaha dengan Aset hak guna ("ROU").

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tersisa, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman penyewa pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman penyewa yang diterapkan pada kewajiban sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 7,41%.

b. Subsewa

Grup telah mereklasifikasi beberapa perjanjian subsewa sebagai sewa pembiayaan. Bagian dari aset hak guna yang merupakan kontrak subsewa dihentikan pengakuannya dan piutang subsewa diakui di laporan posisi keuangan ketika subsewa tersebut dimulai.

Dampak penerapan PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 adalah sebagai berikut:

	PSAK 71,72, dan 73
ASET	
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	(1.134)
Aset kontrak	969
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	(24)
Biaya kontrak	1.185
Aset lancar lainnya	(1.403)
Penyertaan jangka panjang	244
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	(2.154)
Aset hak guna	20.541
Aset pajak tangguhan - bersih	(87)
Aset tidak lancar lainnya	(3.170)
	14.967
LIABILITAS	
Beban yang masih harus dibayar	87
Pendapatan diterima di muka - jangka pendek	903
Liabilitas kontrak	(1.065)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(41)
Pendapatan diterima di muka - jangka panjang	83
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(14.425)
	(14.458)
EKUITAS	
Komponen ekuitas lainnya	48
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	(606)
Kepentingan nonpengendali	50
	(508)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>Standar baru</u>	<u>Standar sebelumnya</u>	<u>Penyesuaian</u>
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
Kas dan setara kas	17.420	17.420	(0)
Piutang usaha – setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	12.721	13.821	(1.100)
Aset kontrak	822	-	822
Piutang lain-lain – setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	237	324	(87)
Biaya kontrak	441	-	441
Aset lancar lainnya	3.560	4.796	(1.236)
Penyertaan jangka panjang	2.052	1.829	223
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	156.641	158.795	(2.154)
Aset hak guna	17.760	-	17.760
Aset pajak tangguhan - bersih	2.975	3.062	(87)
Aset kontrak - bagian tidak lancar	295	-	295
Biaya kontrak - bagian tidak lancar	1.312	-	1.312
Aset tidak lancar lainnya	4.805	7.708	(2.903)
JUMLAH ASET	221.041	207.756	13.285
LIABILITAS			
Beban yang masih harus dibayar	13.684	14.195	511
Pendapatan diterima dimuka	631	5.762	5.131
Liabilitas kontrak	6.801	-	(6.801)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	12.209	7.576	(4.633)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	749	697	(52)
Liabilitas kontrak	1.025	-	(1.025)
Pinjaman jangka panjang	40.044	33.459	(6.585)
JUMLAH LIABILITAS	75.143	61.688	(13.455)
EKUITAS			
Komponen ekuitas lainnya	541	589	48
Laba ditahan	78.175	78.121	(54)
Kepentingan nonpengendali	16.172	16.348	176
JUMLAH EKUITAS	94.888	95.058	170
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan	99.941	99.897	(44)
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	(25.098)	(27.570)	(2.472)
Beban penyusutan dan amortisasi	(21.038)	(18.007)	3.031
Beban umum dan administrasi	(4.234)	(4.206)	28
Beban pemasaran	(2.356)	(2.787)	(431)
Penghasilan (beban) lain – lain bersih	465	455	(10)
Penghasilan pendanaan	644	562	(82)
Biaya pendanaan	(3.457)	(2.810)	647
Pajak tangguhan	575	586	11
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan			
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	1	1
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk	16.679	17.231	552
Kepentingan nonpengendali	6.272	6.398	126

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>(dalam miliar rupiah)</u>
LAPORAN ARUS KAS	
Arus kas bersih dari aktifitas operasi (PSAK 30R)	
Pembayaran sewa operasi	(2.065)
Arus kas bersih dari aktifitas pendanaan (PSAK 73)	
Pembayaran pokok atas liabilitas sewa	(4.541)

ae. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat keputusan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan yang menyertainya, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian tentang asumsi dan perkiraan ini dapat menghasilkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode mendatang.

i. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 28.

ii. Estimasi dan asumsi

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

(a) Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(a) Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 31 dan 32.

(b) Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan reviu atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 11.

(c) Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Grup sebagai *lessee*

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup masuk akal untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Grup menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(d) Kerugian kredit ekpektasian untuk aset keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekpektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat keterlambatan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

(e) Pendapatan

(i) Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Grup menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Grup juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.

Grup menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan / atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Grup menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

Grup juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Grup menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Grup, yaitu internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(e) Pendapatan (lanjutan)

(ii) Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Grup menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Grup menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan.

Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan margin untuk setiap kontrak yang berisi barang dan/atau jasa dengan harga yang tidak dapat diobservasi. Grup saat ini menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis dan informasi dari pihak independen.

(f) Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan *goodwill*

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan *goodwill*, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

Perhitungan arus kas masa depan dalam menentukan nilai wajar aset tetap dan aset tidak lancar lainnya dari entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi melibatkan estimasi yang signifikan. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai wajar terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

(g) Akuisisi

Grup mengevaluasi setiap transaksi akuisisi untuk menentukan akan diperlakukan sebagai akuisisi aset atau kombinasi bisnis. Untuk transaksi yang diperlakukan sebagai akuisisi aset, harga pembelian dialokasikan untuk aset yang diperoleh, tanpa pengakuan *goodwill*. Untuk akuisisi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, Grup menerapkan metode akuisisi akuntansi atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan hasil operasi disertakan dengan hasil Grup dari tanggal akuisisi masing-masing.

Setiap kelebihan dari harga pembelian dibayar atas jumlah yang diakui untuk aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Grup terus mengevaluasi akuisisi yang diperhitungkan sebagai kombinasi bisnis untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun setelah tanggal akuisisi yang berlaku dari setiap transaksi untuk menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan untuk alokasi harga pembelian yang dibayarkan untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih biasanya ditentukan dengan menggunakan salah satu perkiraan biaya penggantian atau metode penilaian arus kas diskonto. Ketika menentukan nilai wajar dari aset berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan biaya untuk mengganti aset dengan aset baru dengan mempertimbangkan faktor seperti umur, kondisi dan masa manfaat ekonomi dari aset. Ketika menentukan nilai wajar dari aset tidak berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan tingkat diskonto yang berlaku dan waktu dan jumlah arus kas masa depan, termasuk tingkat dan persyaratan atas perpanjangan dan pengurangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	30 September 2020		31 Desember 2019		
	Saldo		Saldo		
	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	
Kas	Rp	-	40	-	37
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	Rp	-	983	-	1.407
	US\$	15	225	9	122
	EUR	2	27	1	23
	HKD	1	2	0	1
	JPY	1	0	1	0
	AUD	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	Rp	-	1.096	-	1.033
	US\$	2	33	6	86
	SGD	0	0	0	0
	EUR	-	-	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	Rp	-	166	-	198
	US\$	1	17	3	44
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	Rp	-	54	-	51
Lain-lain	Rp	-	13	-	20
	US\$	0	0	0	0
	SGD	0	0	-	-
Sub-jumlah		-	2.616	-	2.985
Pihak ketiga					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	19	286	14	188
	HKD	6	11	6	10
PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	288	-	33
	US\$	0	1	0	0
	MYR	2	5	-	-
Mega International Commercial Bank Co., Ltd. ("Mega ICBC")	US\$	15	221	2	24
	TWD	30	15	27	12
PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata")	Rp	-	124	-	335
	US\$	-	-	4	62
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	-	0	-	0
	US\$	6	87	11	150
	SGD	7	70	1	7
PT Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	Rp	-	110	-	121
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	Rp	-	3	-	3
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	Rp	-	254	-	401
	US\$	18	267	6	89
	MYR	16	56	4	12
	SGD	1	7	0	3
	EUR	0	7	1	17
	TWD	0	0	0	1
	AUD	0	3	1	7
	MOP	0	1	0	1
	HKD	0	0	0	0
Sub-jumlah		-	1.816	-	1.476
Jumlah bank		-	4.432	-	4.461
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	2.299	-	2.693
	US\$	54	802	32	450
BRI	Rp	-	2.238	-	2.561
	US\$	44	646	36	500
Bank Mandiri	Rp	-	2.254	-	1.129
	US\$	36	540	16	215
BTN	Rp	-	1.900	-	2.733
	US\$	-	-	4	49
Sub-jumlah		-	10.679	-	10.330

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	<u>30 September 2020</u>		<u>31 Desember 2019</u>	
	<u>Saldo</u>		<u>Saldo</u>	
	<u>Mata uang</u>	<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Setara Rupiah</u>
Deposito berjangka (lanjutan)				
Pihak ketiga				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	736	1.394
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank")	US\$	6	85	-
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	35	14
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	US\$	35	522	70
PT Bank Danamon Tbk. ("Bank Danamon")	Rp	-	226	400
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("BTPN")	Rp	-	132	992
PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS")	US\$	5	75	398
Lain-lain	Rp	-	173	1
	Rp	-	125	1
	Rp	-	125	29
	Rp	-	19	43
	US\$	1	16	42
	MYR	-	-	30
Sub-jumlah			<u>2.269</u>	<u>3.414</u>
Jumlah deposito berjangka			<u>12.948</u>	<u>13.744</u>
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian			<u>(0)</u>	<u>-</u>
Jumlah			<u>17.420</u>	<u>18.242</u>

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rupiah	3,25% - 8,25%	4,00% - 9,25%
Mata uang asing	0,70% - 2,90%	0,50% - 3,30%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank yang sehat secara finansial karena dimiliki oleh negara.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

		30 September 2020		31 Desember 2019	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BRI	Rp	-	50	-	-
BNI	Rp	-	20	-	-
Bank Mandiri	Rp	-	10	-	-
Pihak ketiga					
SCB	US\$	-	-	8	111
Lain-lain	Rp	-	18	-	18
	US\$	5	76	5	71
Jumlah deposito berjangka			174	13	200
Reksa dana					
Pihak berelasi					
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCM")	Rp	-	74	-	71
Jumlah reksa dana			74	-	71
Rekening penampungan					
	Rp	-	8	-	142
	US\$	1	21	1	15
	MYR	-	-	6	19
Lainnya					
	Rp	-	106	-	102
	MYR	-	-	2	5
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian			(0)	-	-
Jumlah			383	121	554

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	30 September 2020	31 Desember 2019
Rupiah	4,15% - 6,50%	6,5%
Mata uang asing	0,15% - 1,08%	1,20% - 2,51%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	30 September 2020	31 Desember 2019
BUMN	1.297	1.604
Indonusa	537	494
Indosat	191	150
Lain-lain	391	459
Jumlah	2.416	2.707
Provisi penurunan nilai piutang	(1.265)	(915)
Jumlah bersih	1.151	1.792

(ii) Pihak ketiga

	30 September 2020	31 Desember 2019
Pelanggan individual dan bisnis	15.600	13.710
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	2.377	1.583
Jumlah	17.977	15.293
Provisi penurunan nilai piutang	(6.407)	(5.288)
Jumlah bersih	11.570	10.005

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	30 September 2020	31 Desember 2019
Sampai dengan 3 bulan	1.493	1.563
3 sampai dengan 6 bulan	278	237
Lebih dari 6 bulan	645	907
Jumlah	2.416	2.707
Provisi penurunan nilai piutang	(1.265)	(915)
Jumlah bersih	1.151	1.792

(ii) Pihak ketiga

	30 September 2020	31 Desember 2019
Sampai dengan 3 bulan	10.489	9.270
3 sampai dengan 6 bulan	1.390	1.077
Lebih dari 6 bulan	6.098	4.946
Jumlah	17.977	15.293
Provisi penurunan nilai piutang	(6.407)	(5.288)
Jumlah bersih	11.570	10.005

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha

	30 September 2020			31 Desember 2019	
	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang	Tingkat kerugian kredit ekspektasian	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang
Belum jatuh tempo	9.585	562	5,9%	8.250	395
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	2.397	335	14,0%	2.583	513
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.668	717	43,0%	1.314	458
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	6.743	6.058	89,8%	5.853	4.837
Jumlah	20.393	7.672		18.000	6.203

Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp3.698 miliar dan Rp3.942 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat keterlambatan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	30 September 2020	31 Desember 2019
Rupiah	2.400	2.705
Dolar A.S.	16	2
Lain-lain	-	0
Jumlah	2.416	2.707
Provisi penurunan nilai piutang	(1.265)	(915)
Jumlah bersih	1.151	1.792

(ii) Pihak ketiga

	30 September 2020	31 Desember 2019
Rupiah	14.675	12.883
Dolar A.S.	3.175	2.298
Dolar Australia	6	12
Lain-lain	121	100
Jumlah	17.977	15.293
Provisi penurunan nilai piutang	(6.407)	(5.288)
Jumlah bersih	11.570	10.005

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi provisi penurunan nilai piutang

	30 September 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	6.203	5.029
Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 71	225	-
Provisi yang diakui selama periode berjalan	1.244	2.283
Penghapusbukuan piutang	-	(1.109)
Saldo akhir	7.672	6.203

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 30 September 2020, piutang usaha tertentu entitas anak sebesar Rp6.149 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 19c).

6. ASET KONTRAK

	30 September 2020
Aset kontrak	1.265
Kerugian kredit ekspektasian	(148)
Jumlah bersih	1.117
Jangka pendek	(822)
Jangka panjang	295

7. PERSEDIAAN

	30 September 2020	31 Desember 2019
Komponen	683	351
Kartu SIM dan vaucer prabayar	242	154
Lain-lain	162	172
Jumlah	1.087	677
Provisi atas persediaan usang		
Komponen	(30)	(62)
Kartu SIM dan vaucer prabayar	(28)	(28)
Lain-lain	(3)	(2)
Jumlah	(61)	(92)
Jumlah bersih	1.026	585

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	30 September 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	92	67
Provisi yang diakui selama tahun berjalan	-	25
Penghapusbukuan persediaan	(31)	-
Saldo akhir	61	92

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp358 miliar dan Rp1.493 miliar (Catatan 26).

Persediaan tertentu entitas anak sebesar Rp343 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19c).

Pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019, modul (bagian dari aset tetap) dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp108 miliar dan Rp112 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp155 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

8. ASET LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka (Catatan 36c.i)	1.832	3.879
Uang muka	929	670
Gaji dibayar di muka	354	189
Sewa dibayar di muka	167	1.403
Lain-lain	278	511
Jumlah	<u>3.560</u>	<u>6.652</u>

9. BIAYA KONTRAK

Mutasi biaya kontrak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah:

	<u>30 September 2020</u>		
	<u>Biaya perolehan kontrak</u>	<u>Biaya pemenuhan kontrak</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo, 1 Januari 2020	696	489	1.185
Amortisasi selama periode berjalan	(103)	(354)	(457)
Penambahan selama periode berjalan	526	499	1.025
Saldo, 30 September 2020	1.119	634	1.753
Jangka pendek	(172)	(269)	(441)
Jangka panjang	<u>947</u>	<u>365</u>	<u>1.312</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

Grup memiliki penyertaan saham pada beberapa entitas sebagai berikut:

	30 September 2020									
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penyesuaian atas penerapan PSAK 71	Penambahan (pengurangan)	Perubahan nilai wajar bersih	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:										
Tiphone ^a	24,00	526	-	-	-	(6)	-	-	(308)	212
Finarya ^b	26,58	267	-	-	-	(135)	-	-	-	132
Indonusa ^c	20,00	210	-	-	-	-	-	-	-	210
Jalin ^d	33,00	77	-	-	-	11	(5)	-	-	83
Lain-lain ^e	6,32-51,00	130	-	-	-	(6)	-	-	-	124
Sub-jumlah		1.210	-	-	-	(136)	(5)	-	(308)	761
Penyertaan jangka panjang lainnya		734	244	334	(21)	-	-	-	-	1.291
Jumlah penyertaan jangka panjang		1.944	244	334	(21)	(136)	(5)	-	(308)	2.052

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk 30 September 2020:

	Tiphone*	Finarya	Indonusa*	Jalin	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>					
Aset lancar	8.165	2.141	495	159	1.045
Aset tidak lancar	778	120	253	216	4.324
Liabilitas jangka pendek	(3.824)	(1.789)	(534)	(84)	(1.573)
Liabilitas jangka panjang	(741)	(3)	(278)	(39)	(5.337)
Ekuitas (defisit)	4.378	469	(64)	252	(1.541)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>					
Pendapatan	28.442	21	794	194	1.045
Beban operasional	(27.621)	(505)	(738)	(145)	(1.015)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(321)	5	1	(3)	(219)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	500	(479)	57	46	(189)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(138)	(8)	(10)	(11)	(5)
Laba (rugi) tahun berjalan	362	(487)	47	35	(194)
Laba (rugi) komprehensif lain	77	-	(1)	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	439	(487)	46	35	(194)

* Informasi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

	31 Desember 2019							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:								
Tiphone ^a	24,00	1.602	-	88	(11)	19	(1.172)	526
Finarya ^b	26,58	-	484	(217)	-	-	-	267
Indonusa ^c	20,00	210	-	-	-	-	-	210
Jalin ^d	33,00	-	70	7	-	(0)	-	77
Cellum ^e	30,40	79	-	(8)	-	-	-	71
ILCS ^f	49,00	44	-	(13)	-	0	-	31
GSN ^g	45,00	14	-	(1)	-	-	-	13
Teltranet ^h	51,00	-	34	(24)	-	1	-	11
Lain-lain ⁱ	6,32-32,00	4	(2)	2	-	-	-	4
Sub-jumlah		1.953	586	(166)	(11)	20	(1.172)	1.210
Penyertaan jangka panjang lainnya		519	215	-	-	-	-	734
Jumlah penyertaan jangka panjang		2.472	801	(166)	(11)	20	(1.172)	1.944

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk 2019:

	Tiphone	Finarya	Indonusa	Jalin	Cellum	ILCS	GSN	Teltranet	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>									
Aset lancar	8.165	2.382	495	100	14	119	17	291	615
Aset tidak lancar	778	132	253	222	17	41	169	66	4.033
Liabilitas jangka pendek	(3.824)	(1.533)	(534)	(78)	(10)	(95)	(2)	(356)	(1.089)
Liabilitas jangka panjang	(741)	(3)	(278)	(10)	(27)	(2)	(155)	(58)	(5.101)
Ekuitas (defisit)	4.378	978	(64)	234	(6)	63	29	(57)	(1.542)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>									
Pendapatan	28.442	38	794	205	13	206	7	195	784
Beban operasional	(27.621)	(877)	(738)	(148)	(40)	(212)	(9)	(242)	(800)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(321)	17	1	2	-	(16)	(0)	(15)	(128)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	500	(822)	57	59	(27)	(22)	(2)	(62)	(144)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(138)	1	(10)	(17)	-	(4)	(0)	(43)	(1)
Laba (rugi) periode berjalan	362	(821)	47	42	(27)	(26)	(2)	(105)	(145)
Laba (rugi) komprehensif lain	77	-	(1)	(0)	-	0	-	2	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	439	(821)	46	42	(27)	(26)	(2)	(103)	(145)

^a Tiphone berdiri pada tanggal 25 Juni 2008 dengan nama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar.

Nilai wajar penyertaan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp212 miliar dan Rp526 miliar. Nilai wajar dihitung dengan mengalikan jumlah lembar saham dengan harga pasar pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp121 dan Rp300 per lembar saham.

Rekonsiliasi informasi keuangan dan nilai tercatat penyertaan jangka panjang pada Tiphone pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019
Aset	8.943
Liabilitas	(4.565)
Aset bersih	4.378
Bagian Grup atas aset bersih (24,00% tahun 2019)	1.051
Goodwill	647
Penurunan nilai	(1.172)
Nilai tercatat penyertaan jangka panjang	526

^b Pada tanggal 21 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya") dengan modal awal Rp25 miliar dan pada tanggal 22 Februari 2019 Telkomsel mengalihkan asetnya sebesar Rp 150 miliar. Atas akuisisi ini Telkomsel memperoleh masing-masing 2.499 dan 14.974 lembar saham (kepemilikan saham 100%). Telkomsel dengan PT Mandiri Capital Indonesia, PT BRI Ventura Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Jasamarga Tollroad Operator, PT Dana Tabung dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), PT Pertamina Retail, PT Kereta Commuter Indonesia ("KCI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Danareksa Capital, menandatangani perjanjian pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Oktober 2019, dan 31 Desember 2019 sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh masing-masing pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember 2019, Telkomsel memiliki 48.530 lembar saham atau setara dengan 26,58% kepemilikan saham.

^c Indonusa sebelumnya adalah entitas anak. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33% dan kepemilikan Perusahaan atas Indonusa menjadi 15,67%.

^d Jalin sebelumnya adalah entitas anak. Pada tanggal 19 Juni 2019 Perusahaan menjual 67% kepemilikan sahamnya kepada PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") senilai Rp395 miliar.

^e Investasi pada Cellum dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian pernyataan saham baru bersyarat antara Metranet dengan Cellum Global Zrt pada tanggal 30 Januari 2018. Cellum adalah perusahaan penyedia solusi *mobile payment* dan *commerce services*.

^f PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.

^g Pada tanggal 31 Agustus 2017, NSI dan pihak ketiga mendirikan PT Graha Sakura Nusantara ("GSN") yang menjalankan usaha *real estate*, pemasaran perumahan dan apartemen.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

- ^h Investasi pada Teltranet dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian antara Metra dengan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd. pada tanggal 29 Agustus 2014. Teltranet bergerak dalam bidang jasa sistem komunikasi. Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet.
- ⁱ Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah Rp498 miliar.

11. ASET TETAP

	1 Januari 2020	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	30 September 2020
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.644	-	9	-	2	1.655
Bangunan	14.062	-	107	-	1.447	15.616
Renovasi bangunan sewa	1.549	-	3	(173)	15	1.394
Peralatan sentral telepon	17.348	-	223	(1.919)	1.032	16.684
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	2.258	-	-	-	(675)	1.583
Peralatan dan instalasi transmisi	151.750	-	1.643	(2.298)	5.429	156.524
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	12.344	-	69	(1)	145	12.557
Jaringan kabel	54.357	-	3.263	(56)	344	57.908
Catu daya	20.113	-	167	(208)	656	20.728
Peralatan pengolahan data	16.409	-	148	(323)	1.666	17.900
Peralatan telekomunikasi lainnya	5.340	-	1.173	-	16	6.529
Peralatan kantor	2.361	-	104	(418)	58	2.105
Kendaraan	568	-	48	(11)	36	641
Peralatan lainnya	123	-	18	-	(54)	87
Aset dalam pembangunan	2.619	-	10.947	-	(9.430)	4.136
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.500	-	-	-	(5.500)	-
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	(1)	-
Kendaraan	503	-	-	-	(503)	-
Peralatan kantor	42	-	-	-	(42)	-
Aset CPE	22	-	-	-	(22)	-
Catu daya	-	-	-	-	-	-
Aset Pola Bagi Hasil ("PBH")	89	-	-	-	(89)	-
Jumlah	309.002	-	17.922	(5.407)	(5.470)	316.047

	1 Januari 2020	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	30 September 2020
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	4.113	-	576	-	30	4.719
Renovasi bangunan sewa	1.091	-	180	(225)	-	1.046
Peralatan sentral telepon	11.976	-	1.187	(1.917)	29	11.275
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.580	-	-	-	-	1.580
Peralatan dan instalasi transmisi	79.993	-	8.475	(2.265)	272	86.475
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	5.809	-	655	(1)	8	6.471
Jaringan kabel	14.171	-	1.844	(56)	64	16.023
Catu daya	13.596	-	1.117	(201)	50	14.562
Peralatan pengolahan data	11.977	-	1.146	(318)	(1)	12.804
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.766	-	799	-	(1)	2.564
Peralatan kantor	1.678	-	235	(401)	31	1.543
Kendaraan	210	-	59	(5)	14	278
Peralatan lainnya	66	-	1	-	(1)	66
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	3.734	-	-	-	(3.734)	-
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	(1)	-
Kendaraan	115	-	-	-	(115)	-
Peralatan kantor	44	-	-	-	(44)	-
Aset CPE	20	-	-	-	(20)	-
Catu daya	-	-	-	-	-	-
Aset PBH	89	-	-	-	(89)	-
Jumlah	152.029	-	16.274	(5.389)	(3.508)	159.406
Nilai buku bersih	156.973	-	16.274	(5.389)	(3.508)	156.641

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2019	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2019
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.626	6	16	-	(4)	1.644
Bangunan	11.833	12	779	(4)	1.442	14.062
Renovasi bangunan sewa	1.375	-	37	(58)	195	1.549
Peralatan sentral telepon	15.291	-	1.228	(61)	890	17.348
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.586	-	675	-	(3)	2.258
Peralatan dan instalasi transmisi	141.408	686	6.768	(6.240)	9.128	151.750
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	11.972	-	108	(11)	275	12.344
Jaringan kabel	45.451	-	8.197	(113)	822	54.357
Catu daya	17.864	-	793	(253)	1.709	20.113
Peralatan pengolahan data	14.265	10	709	(107)	1.532	16.409
Peralatan telekomunikasi lainnya	3.423	-	1.904	-	13	5.340
Peralatan kantor	2.142	7	208	(101)	105	2.361
Kendaraan	641	-	99	(167)	(5)	568
Peralatan lainnya	94	-	57	-	(28)	123
Aset dalam pembangunan	4.876	81	14.923	(20)	(17.241)	2.619
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.603	-	-	(102)	(1)	5.500
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	-	1
Kendaraan	578	1	54	(80)	(50)	503
Peralatan kantor	16	-	30	(4)	-	42
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	125	-	-	-	(125)	-
Aset PBH	252	-	-	-	(163)	89
Jumlah	<u>280.444</u>	<u>803</u>	<u>36.585</u>	<u>(7.321)</u>	<u>(1.509)</u>	<u>309.002</u>

	1 Januari 2019	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2019
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	3.405	-	726	(4)	(14)	4.113
Renovasi bangunan sewa	949	-	198	(56)	-	1.091
Peralatan sentral telepon	10.550	-	1.488	(45)	(17)	11.976
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.320	-	260	-	-	1.580
Peralatan dan instalasi transmisi	74.247	-	11.059	(5.260)	(53)	79.993
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	5.005	-	818	(10)	(4)	5.809
Jaringan kabel	12.185	-	2.349	(102)	(261)	14.171
Catu daya	12.316	-	1.454	(239)	65	13.596
Peralatan pengolahan data	10.747	-	1.304	(61)	(13)	11.977
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.029	-	737	-	-	1.766
Peralatan kantor	1.312	-	383	(55)	38	1.678
Kendaraan	281	-	72	(137)	(6)	210
Peralatan lainnya	75	-	1	-	(10)	66
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	3.241	-	587	(94)	-	3.734
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	-	1
Kendaraan	126	-	72	(58)	(25)	115
Peralatan kantor	70	-	3	(3)	(26)	44
Aset CPE	20	-	-	-	-	20
Catu daya	73	-	-	-	(73)	-
Aset PBH	244	-	-	-	(155)	89
Jumlah	<u>137.196</u>	<u>-</u>	<u>21.511</u>	<u>(6.124)</u>	<u>(554)</u>	<u>152.029</u>
Nilai buku bersih	<u>143.248</u>					<u>156.973</u>

a. Laba dari penjualan aset tetap

	2020	2019
Hasil penjualan aset tetap	141	1.261
Nilai buku bersih	(6)	(664)
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	<u>135</u>	<u>597</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain

- (i) Pada tanggal 31 Desember 2019, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2019.
- (ii) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp89 miliar dan Rp87 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 2,38-11,00% dan 3,79%-11,00% masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019.
- (iii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (iv) Pada tanggal 30 September 2020 dan 2019, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp218 miliar dan Rp95 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tanggal 30 September 2020 dan 2019, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp36 miliar dan Rp15 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- (v) Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan peralatan pengolahan data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp233 miliar.

Dampak perubahan umur manfaat ini atas laba sebelum pajak di masa yang akan datang, sebagai berikut:

Tahun	Kenaikan (Penurunan)
2021	18
2022	(106)

- (vi) Pada tahun 2019, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp803 miliar ditukarkan dengan peralatan Ericsson AB, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, dan PT ZTE Indonesia. Pada tanggal 30 September 2020, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih Rp39 miliar akan ditukarkan, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (vii) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-50 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2069. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (viii) Pada tanggal 30 September 2020, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp146.456 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan sebesar Rp24.650 miliar, USD38 juta, HKD8 juta, SGD269 juta, AUD4 juta, dan MYR44 juta dan *first loss basis* sebesar Rp2.750 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

- (ix) Pada tanggal 30 September 2020, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sekitar 41,80% dari nilai kontrak dengan perkiraan penyelesaian sampai dengan Desember 2021. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (x) Seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 19b.i). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan sebesar Rp9.016 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18, 19c dan 19d).
- (xi) Pada tanggal 30 September 2020, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp62.626 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (xii) Pada tahun 2019, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp36.842 miliar.

12. ASET HAK GUNA

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, instalasi dan peralatan transmisi, catu daya, kendaraan, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam operasinya, yang pada umumnya memiliki masa sewa antara 2 dan 15 tahun.

Grup juga memiliki sewa tertentu dengan jangka waktu dua belas bulan atau kurang dan nilai sewa bernilai rendah. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' sebagai pengecualian untuk sewa ini. Tidak ada kontrak sewa dengan pembayaran sewa variabel. Beban sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah sebesar Rp2.065 miliar dikeluarkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Nilai tercatat aset hak guna yang diakui dan mutasi selama periode berjalan:

	31 Desember 2019	Dampak Penerapan PSAK 73	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ translasi	30 September 2020
Harga perolehan:							
Tanah	-	3.772	3.772	745	-	4	4.521
Bangunan	-	594	594	234	(209)	29	648
Peralatan dan instalasi transmisi	-	14.964	14.964	74	(571)	(72)	14.395
Catu daya	-	514	514	-	-	-	514
Kendaraan	-	513	513	8	(2)	-	519
Lain-lain	-	184	184	-	-	-	184
Jumlah	-	20.541	20.541	1.061	(782)	(39)	20.781
Akumulasi amortisasi							
Tanah	-	-	-	(581)	-	-	(581)
Bangunan	-	-	-	(122)	23	(6)	(105)
Peralatan dan instalasi transmisi	-	-	-	(2.473)	324	64	(2.085)
Catu daya	-	-	-	(122)	-	-	(122)
Kendaraan	-	-	-	(83)	-	-	(83)
Lain-lain	-	-	-	(45)	-	-	(45)
Jumlah	-	-	-	(3.426)	347	58	(3.021)
Nilai buku bersih	-						17.760

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET HAK GUNA (lanjutan)

Jatuh tempo pembayaran liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
2020	6.175	936
2021	776	785
2022	2.948	607
2023	2.240	255
2024	1.394	85
Selanjutnya	2.186	45
Jumlah pembayaran sewa	15.719	2.713
Bunga	(2.161)	(373)
Nilai kini atas pembayaran sewa	13.558	2.340
Penyesuaian atas penerapan PSAK 73	-	14.425
Jumlah liabilitas sewa	13.558	16.765
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Note 18b)	(5.397)	(3.185)
Bagian jangka panjang (Note 19)	8.161	13.580

Rekonsiliasi komitmen sewa operasi dan liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Komitmen sewa operasi	18.367
<u>Dikurangi:</u>	
Komitmen untuk sewa jangka pendek	(70)
Komitmen untuk sewa aset bernilai rendah	(58)
Komitmen sewa operasi pada tanggal 1 Januari 2020	18.239
Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020	7,41%
Nilai diskonto komitmen sewa operasi pada tanggal 1 Januari 2020	14.355
<u>Ditambah:</u>	
Penyesuaian atas perlakuan berbeda atas opsi perpanjangan dan opsi terminasi	70
Liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020	14.425

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 8)	1.300	1.488
Tagihan restitusi pajak (Catatan 28b)	777	3.666
Pajak dibayar di muka (Catatan 28a)	769	678
Uang muka pembelian aset tetap	586	481
Beban tangguhan	555	570
Sewa dibayar di muka	267	3.170
Setoran jaminan	161	210
Obligasi konversi	151	319
Lain-lain	239	643
Jumlah	4.805	11.225

Sewa dibayar di muka merupakan pembayaran atas perjanjian sewa jaringan dan peralatan telekomunikasi serta sewa tanah dan bangunan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak dengan jangka waktu di atas 1 tahun.

Pada tanggal 30 September 2020 dan 2019, beban tangguhan mencerminkan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Indefeasible Right of Use* atau "IRU"). Jumlah beban amortisasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp47 miliar dan Rp51 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2020	1.432	12.480	96	1.571	15.579
Penambahan	-	1.634	6	1	1.641
Pengurangan	-	(6)	-	-	(6)
Reklasifikasi/translasi	4	16	(12)	(86)	(78)
Saldo, 30 September 2020	<u>1.436</u>	<u>14.124</u>	<u>90</u>	<u>1.486</u>	<u>17.136</u>
Akumulasi amortisasi:					
Saldo, 1 Januari 2020	(29)	(8.400)	(93)	(611)	(9.133)
Beban amortisasi	(32)	(1.199)	(6)	(90)	(1.327)
Pengurangan	-	6	-	-	6
Reklasifikasi/translasi	-	-	8	12	20
Saldo, 30 September 2020	<u>(61)</u>	<u>(9.593)</u>	<u>(91)</u>	<u>(689)</u>	<u>(10.434)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.375</u>	<u>4.531</u>	<u>(1)</u>	<u>797</u>	<u>6.702</u>

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2019	1.066	10.680	94	687	12.527
Penambahan	-	1.942	4	511	2.457
Akuisisi	467	-	-	379	846
Pengurangan	(104)	(166)	(12)	(14)	(296)
Reklasifikasi/translasi	3	24	10	8	45
Saldo, 31 Desember 2019	<u>1.432</u>	<u>12.480</u>	<u>96</u>	<u>1.571</u>	<u>15.579</u>
Akumulasi amortisasi					
Saldo, 1 Januari 2019	(29)	(6.896)	(81)	(489)	(7.495)
Beban amortisasi	-	(1.165)	(357)	(145)	(1.667)
Pengurangan	-	71	2	14	87
Reklasifikasi/translasi	-	(410)	343	9	(58)
Saldo, 31 Desember 2019	<u>(29)</u>	<u>(8.400)</u>	<u>(93)</u>	<u>(611)</u>	<u>(9.133)</u>
Nilai bersih	<u>1.403</u>	<u>4.080</u>	<u>3</u>	<u>960</u>	<u>6.446</u>

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* PT Bina Data Mandiri (“BDM”) (2012), Contact Centres Australia Pty. Ltd. (2014), PT Media Nusantara Data Global (“MNDG”) (2015), Melon dan PT Griya Silkindo Drajatmoerni (“GSDm”) (2016), TSGN dan Nutech (2017), SSI, CIP, dan Telin Malaysia (2018), dan PST (2019) (Catatan 1e).
- (ii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari “Penyusutan dan Amortisasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak adalah 1- 6 tahun.
- (iii) Pada tanggal 30 September 2020, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah sebesar Rp6.698 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	544	683
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	274	136
Sub-jumlah	818	819
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	10.985	10.634
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan, dan Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")	1.421	1.374
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	1.360	1.070
Sub-jumlah	13.766	13.078
Jumlah	14.584	13.897

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rupiah	11.812	12.027
Dolar A.S.	2.724	1.823
Lain-lain	48	47
Jumlah	14.584	13.897

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	9.212	8.450
Umum, administrasi, dan pemasaran	2.252	2.658
Gaji dan tunjangan	2.084	2.412
Beban bunga dan administrasi bank	136	216
Jumlah	13.684	13.736

17. LIABILITAS KONTRAK

a. Liabilitas kontrak jangka pendek

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Voucer pulsa isi ulang Prabayar	5.256	5.212
Hak material untuk memperpanjang kontrak	104	76
Lain-lain	1.441	1.447
Jumlah	6.801	6.735

b. Liabilitas kontrak jangka panjang

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan	302	327
Hak material untuk memperpanjang kontrak	567	389
Lain-lain	156	87
Jumlah	1.025	803

Saldo liabilitas kontrak pada tanggal 31 Desember 2019, disajikan sebagai pendapatan diterima di muka di laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	30 September 2020		31 Desember 2019	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
Bank Mandiri	Rp	-	2.900	-	2.400
BNI	Rp	-	1.040	-	1.238
PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")	Rp	-	-	-	17
Sub-jumlah			3.940		3.655
Pihak ketiga					
HSBC	Rp	-	2.206	-	1.754
	US\$	0	3	0	4
MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")	Rp	-	1.941	-	1.705
Bank DBS	Rp	-	652	-	722
	US\$	1	13	1	13
PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia")	Rp	-	250	-	500
UOB Singapore ("UOB Singapore")	US\$	9	134	-	-
PT Bank BTPN ("BTPN") (dahulu "Sumitomo")	Rp	-	125	-	-
SCB	Rp	-	100	-	150
Bank CIMB Niaga	Rp	-	78	-	78
PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")	Rp	-	73	-	124
Sub-jumlah			5.575		5.050
Jumlah			9.515		8.705

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Mandiri							
2019 - 2020	Perusahaan, Finnet	Rp	2.600	21 November 2020 - 28 April 2021	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 1,50% 3 bulan JIBOR + 0,60%	Tidak ada
BNI							
2014 - 2017	Sigma ^a , GSD	Rp	325	8 November 2020 - 9 Januari 2021	Bulanan	9,00%	Piutang usaha dan aset tetap
2018 - 2019	Telkom Infratel, Infomedia ^b , Sigma ^a , Metranet, GTS	Rp	2.960	2 Oktober 2020 - 6 Juni 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,20% - 2,50%	Piutang usaha
HSBC							
2018	Sigma ^{c,h}	Rp	600	31 Juli 2021	Bulanan	6,74%	Piutang usaha
2018	Sigma ^{c,h}	US\$	0,004	31 Juli 2021	Bulanan	4,12%	Piutang usaha
2018 - 2019	Perusahaan, Sigma, Melon, Metra, MD Media, PINS	Rp	3.337	8 April 2021 - 30 Agustus 2021	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 0,60% - 0,70% 3 bulan JIBOR + 1,00%	Piutang usaha
MUFG Bank							
2018 - 2019	Perusahaan, Infomedia, Metra, GSD, Telkom Infratel	Rp	1.860	27 Maret 2021 - 23 Agustus 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Bank DBS							
2016	Nutech	Rp	17	18 Oktober 2020	Bulanan	10,50%	Tidak ada
2018	Telkom Infratel, Infomedia	Rp	600	26 Februari 2021 - 31 Juli 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
2016	Sigma ^{d,e}	US\$	0,02	31 Juli 2021	Semesteran	3,25% (US\$), 10,75% (Rp)	Piutang usaha
UOB Indonesia							
2016	Finnet ^f	Rp	500	20 Desember 2020	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,00%	Tidak ada
UOB Singapore							
2016	Telin	US\$	0,049	18 Desember 2020	Bulanan	1 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
Bank BTPN							
2013	PINS	Rp	250	13 Februari 2021	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,25%	Tidak ada
SCB							
2015	GSD ^g	Rp	150	16 Oktober 2020	Bulanan	Cost of fund + 2,5%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga							
2013	GSD ^h	Rp	85	1 Januari 2021	Bulanan	10,90% - 11,50%	Piutang usaha dan aset tetap
BCA							
2019	Telkom Infratel	Rp	600	22 November 2020	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,75%	Piutang usaha

* Disajikan dalam mata uang asal.

** Lihat Catatan 5 dan Catatan 11 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijamin.

^a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 23 April 2019.

^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018.

^c Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 16 Juli 2018.

^d Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2018.

^e Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah.

^f Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Juni 2018.

^g Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 18 Januari 2019.

^h Perpanjangan otomatis jika belum dilunasi.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya batasan bahwa Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham mayoritas paling sedikit 51% terhadap anak perusahaan dalam perjanjian dan mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup telah memperoleh persetujuan (*waver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, kecuali untuk Telkom Infratel, *waver* dari BCA diterima pada tanggal 27 Januari 2020.

Pada tanggal 21 November 2019, Perusahaan, Dayamitra, dan GSD menandatangani amandemen perjanjian kredit modal kerja dengan Bank Mandiri sebesar Rp2.400 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, seluruh fasilitas tersebut telah digunakan.

Pada tanggal 20 Februari 2020, Perusahaan, Infomedia, dan Telkom Infratel menandatangani perubahan perjanjian kredit modal kerja dengan Bank DBS sebesar Rp600 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp125 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2020, Perusahaan, Metra, Infomedia, dan Telin menandatangani perubahan perjanjian kredit modal kerja dengan MUFG Bank sebesar Rp600 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp230 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Pada tanggal 28 Mei 2020, Perusahaan, Metra, MD Media, dan Metranet menandatangani perubahan perjanjian kredit modal kerja dengan HSBC sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp130 miliar.

Pada tanggal 18 Juni 2020, Perusahaan, Infomedia, MD Media, dan Telkom Infratel menandatangani perubahan perjanjian kredit modal kerja dengan MUFG Bank sebesar Rp1.560 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp900 miliar.

Pada tanggal 24 Agustus 2020, Perusahaan, Sigma, dan Melon menandatangani perubahan perjanjian kredit modal kerja dengan HSBC sebesar Rp700 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp207 miliar.

Pada tanggal 19 Agustus 2020, Perusahaan dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit modal kerja dengan MUFG Bank sebesar Rp900 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp19 miliar.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	19a	191	194
Obligasi dan wesel bayar	19b	478	2.491
Utang bank	19c	5.103	5.434
Pinjaman lainnya	19d	1.040	627
Utang sewa pembiayaan	12	-	764
Kewajiban sewa	12	5.397	-
Jumlah		<u>12.209</u>	<u>9.510</u>

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	19a	466	542
Obligasi dan wesel bayar	19b	6.991	7.467
Utang bank	19c	21.712	21.171
Pinjaman lainnya	19d	2.714	3.113
Utang sewa pembiayaan	12	-	1.576
Kewajiban sewa	12	8.161	-
Jumlah		<u>40.044</u>	<u>33.869</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2021	2022	2023	2024	
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	19a	466	69	153	135	109	-
Obligasi dan wesel bayar	19b	6.991	-	2.199	-	-	4.792
Utang bank	19c	21.712	3.136	4.860	5.319	3.573	4.824
Pinjaman lainnya	19d	2.714	109	1.041	1.052	512	-
Kewajiban sewa	12	8.161	569	2.470	1.938	1.211	1.973
Jumlah		40.044	3.883	10.723	8.444	5.405	11.589

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata uang	30 September 2020		31 Desember 2019	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	3.456	488	3.839	491
	US\$	4	63	9	120
	Rp	-	106	-	125
Jumlah			657		736
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18b)			(191)		(194)
Bagian jangka panjang			466		542

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	US\$	Semesteran	Semesteran	3,85%
	Rp	Semesteran	Semesteran	8,38%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2025.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar

	Mata uang	30 September 2020		31 Desember 2019	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
Obligasi dan wesel bayar		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Obligasi					
2010					
Seri B	Rp	-	-	-	1.995
2015					
Seri A	Rp	-	2.200	-	2.200
Seri B	Rp	-	2.100	-	2.100
Seri C	Rp	-	1.200	-	1.200
Seri D	Rp	-	1.500	-	1.500
Wesel bayar jangka menengah (<i>Medium term notes</i> atau "MTN")					
MTN I Telkom Tahun 2018					
Seri A	Rp	-	-	-	-
Seri B	Rp	-	-	-	200
Seri C	Rp	-	296	-	296
MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018					
Seri A	Rp	-	-	-	-
Seri B	Rp	-	-	-	296
Seri C	Rp	-	182	-	182
Jumlah			7.478		9.969
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(9)		(11)
Jumlah			7.469		9.958
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 18b)			(478)		(2.491)
Bagian jangka panjang			6.991		7.467

i. Obligasi

Tahun 2010

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 11b.x). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Sekuritas ("Bahana"), PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank CIMB Niaga. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi pada tanggal 26 September 2018, wali amanat obligasi berganti menjadi BTN.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Tahun 2010 (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi, dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan sistem satelit) dan optimasi *legacy* dan fasilitas penunjang (*fixed wireline* dan *wireless*).

Pada tanggal 30 September 2020, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Tahun 2015

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 11b.x). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *broadband*, *backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *information technology application and support*, dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 30 September 2020, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar

MTN I Telkom Tahun 2018

Wesel bayar	Mata uang	Pokok utang	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun	Jaminan
Seri A	Rp	262	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	7,25%	Seluruh aset
Seri B	Rp	200	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	8,00%	Seluruh aset
Seri C	Rp	296	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	8,35%	Seluruh aset
		<u>758</u>					

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* ("MTN") I Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 24 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp758 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi reguler di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*.

Pada tanggal 30 September 2020, peringkat MTN yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (Triple A).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018

Wesel bayar	Mata uang	Pokok utang	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode imbalan	Cicilan imbalan per tahun	Jaminan
Seri A	Rp	264	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	19	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri B	Rp	296	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	24	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri C	Rp	182	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	15	Hak manfaat obyek Ijarah
		<u>742</u>				<u>58</u>	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar (lanjutan)

MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018 (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN Syariah Ijarah Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 26 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN Syariah Ijarah dengan keseluruhan nilai pokok MTN Syariah Ijarah yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp742 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN Syariah Ijarah tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN Syariah Ijarah tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*. Objek Ijarah dari MTN Syariah Ijarah tersebut berupa jaringan telekomunikasi di wilayah D.I. Yogyakarta yaitu jaringan kabel, peralatan teknologi informasi, dan alat-alat produksi layanan telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 30 September 2020, peringkat MTN Syariah Ijarah yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA Sy (Triple A Syariah).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	30 September 2020		31 Desember 2019	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	8.643	-	5.898
Bank Mandiri	Rp	-	6.370	-	7.611
BRI	Rp	-	2.827	-	1.758
BNI Syariah	Rp	-	46	-	52
Sub-jumlah			<u>17.886</u>		<u>15.319</u>
Pihak ketiga					
BCA	Rp	-	2.941	-	1.665
MUFG Bank	Rp	-	2.363	-	2.981
	US\$	-	-	8	108
Bank Permata	Rp	-	757	-	-
Bank DBS	Rp	-	641	-	770
Bank Sindikasi	Rp	-	25	-	1.250
	US\$	30	453	37	514
UOB Singapore	US\$	31	459	40	556
ANZ	Rp	-	396	-	440
Bank CIMB Niaga	Rp	-	343	-	439
Citibank	Rp	-	250	-	500
BTPN	Rp	-	199	-	537
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	Rp	-	125	-	159
Lain-lain	Rp	-	2	-	1.366
	MYR	12	43	19	66
Sub-jumlah			<u>8.997</u>		<u>11.351</u>
Jumlah			<u>26.883</u>		<u>26.670</u>
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			<u>(68)</u>		<u>(65)</u>
			<u>26.815</u>		<u>26.605</u>
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 18b)			<u>(5.103)</u>		<u>(5.434)</u>
Bagian jangka panjang			<u>21.712</u>		<u>21.171</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
BNI								
2018 - 2019	GSD, Perusahaan	Rp	2.942	40	2018 - 2026	Bulanan, Kuartalan	8,75%, 9,00%	Piutang usaha dan seluruh aset
2013 - 2018	Perusahaan, Telkomsel, GSD, TLT, Sigma, Dayamitra	Rp	11.112	1.375	2016 - 2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 2,20% - 2,50%; 3 bulan JIBOR + 1,85% - 2,25%	Piutang usaha, persediaan, dan aset tetap
Bank Mandiri								
2017 - 2018	Perusahaan, Telkomsel, Balebat	Rp	9.455	6.386	2018 - 2025	Bulanan, Kuartalan	8,50% - 9,00%	Piutang usaha, persediaan, dan aset tetap
2017 - 2019	Perusahaan, GSD, Dayamitra, Telkomsel	Rp	5.163	130	2019 - 2026	Kuartalan, Semesteran	3 bulan JIBOR + 0,60% - 1,85%	Tidak ada
BRI								
2019	Perusahaan	Rp	2.000	-	2021 - 2026	Kuartalan	9,00%	Seluruh aset
2017 - 2019	Perusahaan, Dayamitra, GSD	Rp	1.253	231	2019 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,85% - 2,00%	Aset tetap
Bank BNI Syariah								
2019	SSI	Rp	55	6	2019 - 2024	Bulanan	10,00%	Tidak ada
BCA								
2017 - 2019	Perusahaan, Metra, Dayamitra, Telkom Infratel, PST	Rp	6.420	167	2018 - 2027	Kuartalan, Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,85%	Piutang usaha dan aset tetap
MUFG Bank								
2015 - 2018	GSD, Metra, Dayamitra	Rp	3.200	351	2018 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,43% - 1,50%	Aset tetap dan kontrak sewa
Bank Permata								
2019	Nutech	Rp	7	0,5	2019 - 2026	Bulanan	9,25%	Tidak ada
2020	Dayamitra	Rp	750	-	2020 - 2027	Kuartalan	3 Bulan JIBOR + 1,50%	Aset tetap
Bank DBS								
2016	Nutech	Rp	6	1	2017 - 2021	Bulanan	11,00%	Piutang usaha dan aset tetap
2017 - 2019	PINS, Dayamitra, Telkomsat	Rp	905	128	2018 - 2026	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,85%	Tidak ada
Bank Sindikasi								
2015	GSD	Rp	100	16	2016 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00%	Seluruh aset
2018	TII	US\$	0,09	0,007	2019 - 2024	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
UOB Singapore								
2016	TII	US\$	0,06	0,009	2019 - 2024	Bulanan	1 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
ANZ								
2015 - 2017	GSD, PINS	Rp	750	44	2020	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00%	Tidak ada

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Bank CIMB Niaga								
2017 - 2019	GSD, Metra	Rp	495	89	2018 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
Citibank								
2018	Perusahaan	Rp	1.000	250	2019 - 2020	Kuartalan	8,50%	Tidak ada
BTPN								
2015 - 2019	GSD, Metra, Dayamitra, TII	Rp	559	71	2018 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,44% - 1,50%	Tidak ada
ICBC								
2017	GSD	Rp	272	34	2017 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,36%	Piutang usaha dan aset tetap

* Disajikan dalam mata uang asal

** Lihat Catatan 5, Catatan 7 dan Catatan 11 untuk piutang usaha, persediaan dan aset tetap yang dijamin.

^a Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 30 September 2020, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 Desember 2018.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 30 September 2020, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman atas tidak terpenuhinya rasio-rasio keuangan kecuali *current ratio* untuk posisi keuangan Telkom Infratel. *Waiver* untuk Telkom Infratel diterima pada tanggal 27 Januari 2020, sehingga pada tanggal 31 Desember 2019, pinjaman kepada BCA sebesar Rp50 miliar telah diklasifikasikan kembali sebagai liabilitas lancar.

Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan, GSD, Metra dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN, MUFG Bank, ANZ, dan bank sindikasi (BCA dan BNI) dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp750 miliar, Rp750 miliar, Rp500 miliar, dan Rp3.000 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 2 Agustus 2016, Dayamitra dan Telkom Akses dimasukkan sebagai peminjam ke perjanjian fasilitas kredit BTPN dan MUFG Bank, serta mengecualikan GSD dari perjanjian tersebut. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 13 Maret 2017, PINS dimasukkan sebagai salah satu peminjam dalam perjanjian fasilitas kredit ANZ. Pada tahun 2017, PINS melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp200 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang tidak digunakan dari BTPN, MUFG Bank, dan ANZ masing-masing sebesar Rp82,6miliar, Rp82,6miliar, dan Rp60 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan, Dayamitra, Sigma, GSD, dan TII menandatangani perjanjian kredit dengan BRI, BNI, dan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp2.005 miliar, dan Rp1.500 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, sisa fasilitas yang tidak digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp5 miliar.

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan, GSD, Metra, Dayamitra, PINS, dan Telkom sat menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, BTPN, Bank DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA, dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp400 miliar, Rp400 miliar, Rp850 miliar, Rp495 miliar, dan Rp850 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 29 Juni 2017, BCA setuju Telkom Infratel menggantikan PINS selaku debitur yang dapat melakukan penarikan kredit. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang tidak digunakan dari MUFG Bank, BTPN, Bank DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA masing-masing sebesar Rp79,5 miliar, Rp79,5 miliar, Rp420 miliar, Rp20 miliar, dan Rp564 miliar.

Pada tanggal 21 dan 27 Maret 2018, Perusahaan dan Dayamitra menandatangani perjanjian kredit dengan BRI, dan MUFG Bank, dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp200 miliar, dan Rp800 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan dan TeliN menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas Perusahaan sebesar Rp775 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 15 Januari 2019, Perusahaan, Infomedia, TII, Telkom Infratel, Telkom sat, dan Sigma menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN dengan jumlah fasilitas sebesar Rp628 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang tidak digunakan dari BTPN sebesar Rp538 miliar.

Pada tanggal 19 Juni 2019, Perusahaan dan Dayamitra menandatangani perjanjian dengan BNI dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.160 miliar dan Rp840 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang belum digunakan dari BNI sebesar Rp840 miliar.

Pada tanggal 8 Juli 2019, Perusahaan, PINS, dan GSD menandatangani perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp500 miliar, Rp300 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang belum digunakan dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp908 miliar.

Pada tanggal 21 November 2019, Perusahaan, Dayamitra, dan GSD menandatangani amandemen perjanjian dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.400 miliar, Rp1.113 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp405 miliar.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

d. Pinjaman lainnya

Kreditur	Mata uang	Saldo terutang	
		30 September 2020	31 Desember 2019
PT Sarana Multi Infrastruktur	Rp	3.762	3.748
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(8)	(8)
Jumlah		3.754	3.740
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 18b)		(1.040)	(627)
Bagian jangka panjang		2.714	3.113

i. Dayamitra

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
PT Sarana Multi Infrastruktur							
12 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	700	100	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR + 1,85%	Aset tetap (Catatan 9)
29 Maret 2017	Dayamitra	Rp	600	514	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR + 1,85%	Aset tetap (Catatan 9)

Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 5:1.
- (b) *Net Debt to EBITDA* tidak lebih dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 30 September 2020, Dayamitra telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

ii. Perusahaan

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
PT Sarana Multi Infrastruktur							
14 November 2018	Perusahaan	Rp	1.000	110	Semesteran (2019 - 2023)	8,35%	Tidak ada
29 Maret 2019	Perusahaan	Rp	2.273	350	Semesteran (2020 - 2024)	8,49%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap biaya bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal 125%.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

d. Pinjaman lainnya (lanjutan)

iii. Telkomsat

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata Uang</u>	<u>Total fasilitas (dalam miliar)*</u>	<u>Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*</u>	<u>Jadwal pembayaran</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
PT Sarana Multi Infrastruktur 29 Maret 2019	Telkomsat	Rp	164	164	Semesteran (2020 - 2024)	8,49%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Telkomsat diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap biaya bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal 125%.

Pada tanggal 30 September 2020, Telkomsat telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Pada tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan, Telkomsat, dan Telkom Infratel menandatangani amandemen perjanjian kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.836 miliar, Rp164 miliar, dan Rp0 miliar. Pada tanggal 30 September 2020, fasilitas yang tidak digunakan dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp36 miliar.

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	15.769	17.221
GSD	218	230
TII	108	108
Metra	77	130
Jumlah	16.172	17.689
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) periode berjalan entitas anak:		
Telkomsel	6.292	6.759
GSD	(10)	(22)
TII	(1)	(5)
Metra	(9)	8
Dayamitra	-	1
Jumlah	6.272	6.741

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dibawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Aset lancar	14.107	18.657
Aset tidak lancar	82.794	64.073
Liabilitas jangka pendek	(29.694)	(20.892)
Liabilitas jangka panjang	(22.110)	(12.629)
Jumlah ekuitas	<u>45.097</u>	<u>49.209</u>
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	29.328	31.988
Kepentingan nonpengendali	15.769	17.221

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan	65.134	68.321
Beban operasi	(41.109)	(42.153)
Beban lain-lain - bersih	(1.014)	(225)
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>23.011</u>	<u>25.943</u>
Beban pajak penghasilan - bersih	(4.995)	(6.631)
Laba periode berjalan dari operasi yang masih berlanjut	<u>18.016</u>	<u>19.312</u>
Penghasilan komprehensif lain - bersih	-	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	<u>18.016</u>	<u>19.312</u>
Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	6.292	6.759
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	7.725	8.490

Ringkasan laporan arus kas

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kegiatan operasi	35.164	31.620
Kegiatan investasi	(7.691)	(9.791)
Kegiatan pendanaan	(29.069)	(21.187)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	<u>(1.596)</u>	<u>642</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM

Keterangan	30 September 2020		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.092.964.480	4,13	205
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Budi Setyawan Wijaya	180.000	0	0
Dian Rachmawan	120.222	0	0
Afriwandi	42.500	0	0
Herlan Wijanarko	42.500	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	43.365.323.883	43,78	2.168
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

Keterangan	31 Desember 2019		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham Seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.601.837.380	4,65	230
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Harry Mozarta Zen	474.692	0	0
Faizal Rochmad Djoemadi	126.800	0	0
Bogi Witjaksono	55.000	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Siti Choiriana	540	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	42.856.179.173	43,26	2.143
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446	1.446
Selisih lebih harga penjualan kembali 211.290.500 saham yang diperoleh kembali pada tahap I atas biaya perolehannya	544	544
Selisih lebih harga penjualan kembali 215.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap II atas biaya perolehannya	576	576
Selisih lebih harga pengalihan saham yang diperoleh kembali untuk program kepemilikan saham karyawan atas biaya perolehannya	228	228
Selisih lebih harga penjualan kembali 22.363.000 sisa saham yang diperoleh kembali pada tahap III atas biaya perolehannya	36	36
Selisih lebih harga penjualan kembali 864.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap IV atas biaya perolehannya	1.996	1.996
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373)	(373)
Pengurangan tambahan modal disetor sebagai akibat penarikan modal saham yang diperoleh kembali	(2.454)	(2.454)
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	(22)	(22)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	734	734
Jumlah bersih	<u>2.711</u>	<u>2.711</u>

23. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	749	568
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	6	54
Selisih transaksi akuisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(637)	(637)
Komponen ekuitas lainnya	37	37
Jumlah	<u>541</u>	<u>408</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN

2020	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon	13.448	817	652	222	-	15.139
Pendapatan Interkoneksi	326	-	-	5.704	-	6.030
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	45.364	-	-	-	-	45.364
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	5	4.892	1.204	-	6.101
SMS	3.463	-	343	-	-	3.806
Lain-lain	-	-	554	452	176	1.182
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	48.827	5	5.789	1.656	176	56.453
Pendapatan jaringan	4	-	379	693	-	1.076
Pendapatan Indihome	-	14.334	1.779	-	-	16.113
Pendapatan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	714	-	-	714
Call center service	-	-	557	53	-	610
E-health	-	-	408	-	-	408
E-payment	-	-	345	-	17	362
Lain-lain	-	32	840	304	257	1.433
Jumlah pendapatan lainnya	-	32	2.864	357	274	3.527
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	62.605	15.188	11.463	8.632	450	98.338
Pendapatan dari sumber lainnya	-	-	-	1.603	-	1.603
Jumlah pendapatan	62.605	15.188	11.463	10.235	450	99.941
Penyesuaian dan eliminasi	(2)	18	2	(2)	(296)	
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	62.603	15.206	11.465	10.233	154	

2019	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon	19.098	1.065	875	213	-	21.251
Pendapatan Interkoneksi	462	-	-	4.305	-	4.767
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	41.242	-	-	-	-	41.242
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	35	6.194	965	-	7.194
SMS	5.178	-	273	-	-	5.451
Lain-lain	-	-	323	267	90	680
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	46.420	35	6.790	1.232	90	54.567
Pendapatan jaringan	3	-	647	695	-	1.345
Pendapatan Indihome	-	12.113	1.651	-	-	13.764
Pendapatan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	1.584	1	-	1.585
Sewa menara telekomunikasi	-	-	-	914	-	914
Call center service	-	-	442	113	-	555
E-payment	-	-	356	-	122	478
E-health	-	-	377	-	-	377
Lain-lain	-	34	1.985	687	322	3.028
Jumlah pendapatan lainnya	-	34	4.744	1.715	444	6.937
Jumlah pendapatan	65.983	13.247	14.707	8.160	534	102.631
Penyesuaian dan eliminasi	-	2	214	31	(321)	
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	65.983	13.249	14.921	8.191	213	

Manajemen mengharapkan bahwa sebagian besar transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 30 September 2020 akan diakui sebagai pendapatan selama periode pelaporan berikutnya. Kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi pada tanggal 30 September 2020, bagian yang diharapkan dapat direalisasi dalam satu tahun adalah sebesar Rp7.036 miliar dan bagian yang lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp5.086 miliar.

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa meyewa yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan. Sewa ini memiliki jangka waktu antara 1 hingga 10 tahun. Semua sewa termasuk klausul untuk memungkinkan revisi atas biaya sewa setiap tahun sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Penyewa juga diharuskan untuk memberikan jaminan nilai residu pada properti yang disewa. Pendapatan sewa yang diakui oleh Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah senilai Rp1.603 miliar.

Tidak ada pendapatan dari pelanggan utama yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN (lanjutan)

Penyajian akun pendapatan dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah disesuaikan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020. Ikhtisar akun pendapatan yang disesuaikan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

	Sebelum penyesuaian		Penyesuaian		Setelah penyesuaian	
	Consumer	Enterprise	Consumer	Enterprise	Consumer	Enterprise
Pendapatan telepon	2.339	1.494	(1.274)	(619)	1.065	875
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	9.075	7.078	(9.040)	(884)	35	6.194
TV berbayar	1.406	135	(1.406)	(135)	-	-
Lain-lain	32	325	(32)	(2)	-	323
Pendapatan jaringan	-	658	-	(11)	-	647
Pendapatan Indihome	-	-	12.113	1.651	12.113	1.651
Pendapatan lainnya						
Lain-lain	395	-	(361)	-	34	-

25. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Gaji dan tunjangan	6.215	6.038
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	2.831	2.593
Beban pensiun berkala, bersih (Catatan 31)	849	655
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih (Catatan 31)	214	153
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 32)	128	115
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Catatan 31)	107	110
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 31)	18	24
Lain-lain	44	56
Jumlah	10.406	9.744

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

26. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Operasi dan pemeliharaan	14.122	17.620
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 36c.i)	4.397	4.273
Sewa sirkit dan CPE	2.049	3.544
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.749	1.813
Listrik, gas, dan air	782	793
Beban pokok penjualan kartu SIM dan voucher (Catatan 7)	348	465
Sewa menara	16	356
Beban pokok penjualan <i>handset</i> (Catatan 7)	10	1.028
Lain-lain	1.625	1.164
Jumlah	25.098	31.056

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Provisi penurunan nilai piutang dan aset kontrak	1.235	1.899
Beban umum	1.172	1.230
Jasa profesional	620	473
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	226	327
Perjalanan	197	285
Sumbangan sosial	163	135
Beban penagihan	136	137
Rapat	130	198
Lain-lain	355	248
Jumlah	4.234	4.932

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

28. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	30 September 2020	31 Desember 2019
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 22 - Pembelian barang	-	6
Pasal 23 - Penyerahan jasa	6	90
PPN	765	678
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	170	-
Pasal 4 (2) - Pajak final	-	13
Pasal 22 - Pembelian barang	5	-
Pasal 23 - Penyerahan jasa	482	2
PPN	2.565	2.458
Jumlah pajak dibayar di muka	3.993	3.247
Bagian jangka pendek	(3.224)	(2.569)
Bagian jangka panjang (Catatan 13)	769	678

b. Tagihan restitusi pajak

	30 September 2020	31 Desember 2019
Perusahaan		
PPh Badan	103	406
PPN	193	2.046
Entitas anak		
PPh		
PPh Badan	709	992
Pasal 23 - Penyerahan jasa	17	44
PPN	559	1.170
Jumlah tagihan restitusi pajak	1.581	4.658
Bagian jangka pendek	(804)	(992)
Bagian jangka panjang (Catatan 13)	777	3.666

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	27	43
Pasal 21 - PPh pribadi	49	101
Pasal 22 - Pembelian barang	9	7
Pasal 23 - Penyerahan jasa	22	38
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	103	6
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	5	9
Pasal 29 - PPh Badan	542	1.059
PPN atas Pemungutan Pajak ("WAPU")	335	487
	<u>1.092</u>	<u>1.750</u>
Entitas anak:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	115	153
Pasal 21 - PPh pribadi	90	108
Pasal 22 - Pembelian barang	3	3
Pasal 23 - Penyerahan jasa	10	80
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	500	7
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	38	5
Pasal 29 - PPh Badan	456	473
PPN	1.228	852
	<u>2.440</u>	<u>1.681</u>
Jumlah utang pajak	<u>3.532</u>	<u>3.431</u>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kini		
Perusahaan	1.311	1.154
Entitas anak	6.067	7.042
	<u>7.378</u>	<u>8.196</u>
Tanggungan		
Perusahaan	77	(205)
Entitas anak	(652)	(77)
	<u>(575)</u>	<u>(282)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>6.803</u>	<u>7.914</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	29.754	31.114
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	16.776	17.966
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	46.530	49.080
Dikurangi: laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(29.042)	(31.954)
Laba sebelum pajak penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan atas pajak final - Perusahaan	17.488	17.126
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(325)	(419)
Laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi penghasilan atas pajak final - Perusahaan	17.163	16.707
Perbedaan temporer:		
Provisi penurunan nilai piutang	733	1.386
Provisi imbalan karyawan	(38)	(61)
Pendapatan instalasi tanggungan	206	123
Penyusutan dan laba atas penjualan aset tetap	(400)	(289)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(158)	(213)
Sewa pembiayaan	1	(5)
Penyisihan lain-lain	56	75
Jumlah perbedaan temporer bersih	400	1.016
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	214	152
Imbalan karyawan	125	139
Sumbangan	155	147
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(11.434)	(12.368)
Lain-lain	57	(314)
Jumlah perbedaan tetap bersih	(10.883)	(12.244)
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	6.680	(5.479)
Beban pajak penghasilan kini	1.269	1.096
Beban pajak penghasilan final	42	58
Jumlah beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	1.311	1.154
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	6.067	7.042
Jumlah beban pajak penghasilan kini	7.378	8.196

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 19% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	29.754	31.114
(Dikurangi) ditambah pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih konsolidasian	<u>(1.888)</u>	<u>(1.581)</u>
	<u>27.866</u>	<u>29.533</u>
Beban pajak penghasilan dihitung pada tarif Perusahaan 19% (2020) dan 20% (2019)	5.295	5.907
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	643	1.237
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	529	549
Beban pajak penghasilan final	42	60
Penyesuaian tarif pajak Perpu No.1 Tahun 2020	94	-
Pajak tangguhan yang tidak diakui	44	10
Lain-lain	156	151
Beban pajak penghasilan bersih	<u>6.803</u>	<u>7.914</u>

Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 menerapkan peraturan di bawah Peraturan Pemerintah ("PP") No. 56/2015 mengenai pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang telah dipersyaratkan, sehingga untuk perhitungan beban pajak kini dan liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 5%.

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2/2020, yang antara lain mengatur penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% untuk tahun pajak 2022. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 30/2020 tentang Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang mengatur pemberian tarif pajak sebesar 3% lebih rendah untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal, dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan masih memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, sehingga Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dalam perhitungan beban dan liabilitas pajak penghasilan badan Perusahaan.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 19% untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 dan sebesar 20% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 dan sebesar 25% untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini di atas dalam SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2020 kepada kantor pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

- e. Pemeriksaan pajak

- (i) Perusahaan

PPN Tahun 2007

Pada tanggal 15 November 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk PPN masa pajak Januari s.d. September dan November 2007 senilai Rp142 miliar.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Perusahaan mengajukan keberatan dan pada bulan Desember 2014, Otoritas Pajak menerbitkan keputusan penolakan atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan. Perusahaan menerima hasil pemeriksaan kurang bayar PPN senilai Rp22 miliar (termasuk denda Rp10 miliar) dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN interkoneksi *international incoming call* senilai Rp120 miliar (termasuk denda Rp39 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak.

Pada tanggal 12 Maret 2015, Perusahaan telah mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas penolakan keberatan terhadap pemeriksaan atas PPN interkoneksi *international incoming call*.

Pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas proses banding PPN interkoneksi *international incoming call* tersebut, dimana dalam putusannya dinyatakan bahwa transaksi atas interkoneksi *international incoming call* adalah penyerahan jasa kena pajak dan dikategorikan sebagai ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan. Pada bulan September 2017, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp116 miliar dan saldo tersisa senilai Rp5 miliar telah dikompensasikan sebagai pembayaran Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk PPh Pasal 21 dan SKPKB untuk PPN WAPU dan PPN Jasa Luar Negeri untuk masa pajak tahun 2012. Pada tanggal 26 Oktober dan 23 November 2017, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali. Pada tanggal 23 November dan 21 Desember 2017, sebagai tanggapan atas memori peninjauan kembali dari Otoritas Pajak, Perusahaan mengajukan kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas perkara PPN interkoneksi *international incoming call*.

Pada bulan September dan November 2018, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung yang diputuskan pada bulan April dan Oktober 2018 sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk masa pajak Juni s.d. Agustus dan November 2007 dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Otoritas Pajak dan memperkuat putusan Pengadilan Pajak.

Pada bulan Januari, Februari dan Maret 2019, Perusahaan menerima putusan dari Mahkamah Agung yang diputuskan pada bulan Oktober dan Desember 2018 sebagai hasil dari pemeriksaan pajak untuk masa pajak Januari s.d. April dan September 2007. Pada tanggal 19 September 2019, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung yang diputuskan pada tanggal 8 Mei 2019 atas sengketa pajak masa Mei 2007. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Otoritas Pajak dan menguatkan keputusan Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Perusahaan telah menerima seluruh putusan Mahkamah Agung atas sengketa PPN interkoneksi *international incoming call* atas masa pajak Januari s.d. September dan November 2007 yang menguatkan penerapan PPN atas transaksi interkoneksi *international incoming call* yang dilakukan Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2011

Pada tanggal 21 Oktober 2014, Perusahaan menerima SKPKB dari Otoritas Pajak untuk tahun fiskal 2011. Berdasarkan SKPKB tersebut, Perusahaan menerima SKPKB PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2011 senilai Rp182,5 miliar (termasuk denda Rp60 miliar) dan SKPKB PPh Badan senilai Rp2,8 miliar (termasuk denda Rp929 juta). Bagian yang telah diterima senilai Rp4,7 miliar (termasuk denda Rp2 miliar) atas SKPKB PPN telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN interkoneksi *international incoming call* senilai Rp177,9 miliar (termasuk denda Rp58 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak.

PPN Tahun 2011

Pada tanggal 7 Januari 2015, Perusahaan telah mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2015, Otoritas Pajak telah menerbitkan putusan penolakan keberatan.

Sebagai tanggapan atas putusan keberatan tersebut, pada tanggal 20 Januari 2016, Perusahaan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas penolakan keberatan terhadap pemeriksaan atas PPN interkoneksi *international incoming call*.

Pada tanggal 4 dan 5 April 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan yang diputuskan pada tanggal 20 Maret 2017 atas proses banding terkait PPN interkoneksi *international incoming call*. Dalam putusannya, dinyatakan bahwa transaksi atas PPN interkoneksi *international incoming call* adalah penyerahan jasa kena pajak dan termasuk sebagai kategori ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011 senilai Rp73,9 miliar. Pengadilan Pajak menolak banding yang diajukan oleh Perusahaan untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011 senilai Rp104 miliar, dikarenakan Perusahaan dianggap tidak memenuhi ketentuan formal. Atas putusan penolakan tersebut, pada tanggal 19 dan 21 Juni 2017, Perusahaan mengajukan memori peninjauan kembali. Pada bulan Mei 2017, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi pajak untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011 senilai Rp73,9 miliar yang dikompensasi dengan STP 2013 dan 2014 masing-masing senilai Rp59,9 miliar dan Rp14 miliar.

Pada tanggal 15 Oktober 2018, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Pada tanggal 13 November 2018, Perusahaan mengajukan kontra memori peninjauan kembali untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011 kepada Mahkamah Agung. Pada bulan April dan November 2018, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan kontra memori peninjauan kembali untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011.

Pada bulan Mei s.d. September dan November 2019, Perusahaan telah menerima putusan Mahkamah Agung yang diputuskan pada bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus dan September 2019, dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Perusahaan atas masa pajak Februari, Maret dan Mei s.d. Agustus 2011, serta menolak permohonan peninjauan kembali Otoritas Pajak atas masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Pada tanggal 21 Agustus 2019, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi pajak untuk masa pajak Maret, Mei dan Juni 2011 senilai Rp44 miliar. Atas putusan masa pajak April 2011 yang diputuskan pada bulan April 2019, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Perusahaan dan putusan tersebut sudah diunggah melalui laman Mahkamah Agung. Pada tanggal 24 Januari dan 31 Maret 2020, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi pajak untuk masa pajak Februari, Agustus, April dan Juli 2011 senilai Rp59 miliar. Dengan demikian, Perusahaan telah menerima seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung serta telah menerima seluruh pengembalian atas restitusi pajak untuk seluruh masa pajak tahun 2011.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2012

Pada tanggal 3 Mei 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2012. Pada tanggal 3 November 2016, Otoritas Pajak menerbitkan SKPKB PPh Badan senilai Rp991,6 miliar (termasuk denda Rp321,6 miliar), SKPKB PPN senilai Rp467 miliar (termasuk denda Rp153,5 miliar), SKPKB PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ("JKP") dari Luar Daerah Pabean senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta), SKPKB PPN WAPU senilai Rp57 miliar (termasuk denda Rp18,5 miliar), tagihan pajak PPN senilai Rp37,5 miliar, SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp16,2 miliar (termasuk denda Rp5,3 miliar), SKPKB PPh Final pasal 21 senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp407 juta), SKPKB PPh Pasal 23 senilai Rp63,5 miliar (termasuk denda Rp20,6 miliar), SKPKB PPh Pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), dan SKPKB PPh pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64 miliar). Perusahaan telah menyetujui senilai Rp35,2 miliar terkait perhitungan kembali pengkreditan pajak masukan atas penyelenggaraan jasa interkoneksi *international incoming call*, Rp613,3 juta atas Pajak Penghasilan, dan Rp311,5 juta atas PPh Pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016. Pada tanggal 16 November 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan lainnya.

Pada tanggal 1 Maret 2017 dan 9 Mei 2017, Perusahaan menerima surat keputusan dari Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN Jasa Luar Negeri senilai Rp1,8 juta (termasuk denda Rp0,6 juta) dan kurang bayar PPN WAPU senilai Rp4,4 miliar (termasuk denda Rp1,4 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, Perusahaan menerima keputusan tersebut. Pada tanggal 19 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Perusahaan dimana Otoritas Pajak telah mengurangi kurang bayar atas PPh Badan dan menambah kurang bayar atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 26 dengan rincian kurang bayar Pajak Pasal 21 senilai Rp20,7 miliar (termasuk denda Rp6,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 21 Final senilai Rp23,8 miliar (termasuk denda Rp7,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 23 senilai Rp115,7 miliar (termasuk denda Rp37,5 miliar), kurang bayar PPh Pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64,1 miliar), dan kurang bayar PPh Badan senilai Rp496,4 miliar (termasuk denda Rp161 miliar). Pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan untuk PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2012 dimana Otoritas Pajak telah menambahkan dan mengurangi jumlah kurang bayar yang masih harus dibayar oleh Perusahaan senilai Rp429,3 miliar (termasuk denda Rp141,2 miliar).

Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 17 dan 26 Januari 2018, Perusahaan mengajukan banding dan telah menempuh serangkaian sidang banding. Pada bulan September 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan (pembetulan) atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan, dimana Otoritas Pajak telah mengurangi jumlah kurang bayar atas PPN untuk masa pajak Maret, April, September, dan Desember 2012 senilai Rp9,9 miliar (termasuk denda Rp3,2 miliar). Sehingga, sampai dengan 31 Desember 2018, kurang bayar atas PPN untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2012 senilai Rp419,4 miliar (termasuk denda Rp138 miliar).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Desember 2019, Perusahaan menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas sengketa pajak atas semua jenis pajak tahun 2012. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan terkait pajak penghasilan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk PPh Pasal 21 senilai Rp52,4 juta (termasuk denda Rp17 juta), PPh Pasal 23 senilai Rp1,4 miliar (termasuk denda Rp0,4 miliar), PPh Pasal 26 senilai Rp802,6 juta (termasuk denda Rp260,3 juta), PPh Pasal 4 (2) senilai Rp1,3 juta (termasuk denda Rp0,4 juta). Untuk permohonan banding atas PPh Pasal 21 Final, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan. Selanjutnya, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding terkait PPh Badan dan PPN yang diajukan Perusahaan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk PPh Badan senilai Rp29,6 miliar (termasuk denda Rp9,6 miliar) dan PPN senilai Rp51,1 miliar (termasuk denda Rp17,5 miliar). Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi PPN masa Desember 2012 senilai Rp46,7 miliar yang seluruhnya dikompensasikan kepada SKPKB PPN masa pajak Januari s.d November 2012.

Pada bulan April 2020, Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP PPN Masa Januari – Desember 2012. Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan STP dengan melakukan perhitungan ulang berdasarkan hasil putusan banding, sehingga nilai SPT yang semula Rp37,5 miliar menjadi Rp5,8 miliar. Pada bulan Juni 2020, Perusahaan menerima Keputusan DJP yang mengabulkan permohonan tersebut. Pada bulan Juli 2020, Perusahaan menerima pengembalian senilai Rp31,7 miliar dan senilai Rp20,9 juta dikompensasikan ke STP PPh Pasal 21 dari beberapa KPP.

Pada bulan Juli 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali untuk seluruh Putusan Pengadilan Pajak. Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan telah menyampaikan jawaban berupa kontra memori peninjauan kembali untuk seluruh Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, putusan tersebut belum diterima.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2015.

Pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4,1 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55,3 miliar (termasuk denda Rp16,8 miliar). Perusahaan juga menerima STP atas PPN senilai Rp34 miliar, PPN WAPU senilai Rp7 miliar, dan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan senilai Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar yang sebelumnya dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015 ke SPT PPh Badan tahun 2016. Perusahaan juga menerima ketetapan kurang bayar PPN, kurang bayar PPN WAPU, serta STP PPN WAPU senilai Rp26 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017. Pada tanggal 24 Juli 2017, Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Otoritas Pajak atas SKPLB PPh Badan dengan keberatan

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2015 (lanjutan)

senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar.

Pada tanggal 3 dan 22 Mei 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp54,6 miliar dan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Perusahaan. Perusahaan telah menyetujui hasil dari Otoritas Pajak atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp793 juta dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada tanggal 18 Juli 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menambah jumlah pajak yang masih harus diterima senilai Rp76 miliar. Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan mengajukan banding.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Perusahaan menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi tambahan lebih bayar PPh Badan hasil putusan banding senilai Rp90,9 miliar.

PPH dan PPN Tahun 2016

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2016.

Pada tanggal 7 Juni 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp15,3 miliar, SKPKB PPh Pasal 26 senilai Rp556,7 juta (termasuk denda Rp180,5 juta) dan SKPLB PPN senilai Rp922,7 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp15,3 miliar dan saldo tersisa senilai Rp99,1 miliar telah dibebankan sebagai pajak kini atas pemeriksaan pajak, kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp557 juta, kredit pajak PPN senilai Rp10,5 miliar, STP PPN WAPU senilai Rp7,1 miliar, PPN atas pemberian cuma-cuma senilai Rp7,3 miliar, PPN atas pengalihan aset senilai Rp1,2 miliar, dan STP PPN senilai Rp1,7 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp882,7 miliar dan untuk sisa saldo senilai Rp39,9 miliar telah dikompensasikan ke STP PPN senilai Rp31,9 miliar, PPN WAPU senilai Rp7,1 miliar, PPh Pasal 23 senilai Rp556 juta, dan PPh Pasal 21 senilai Rp300 juta. Atas surat ketetapan tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2018, Perusahaan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terkait interkoneksi *international incoming call* senilai Rp151,7 miliar dan STP PPN senilai Rp30,3 miliar.

Pada tanggal 11 Maret dan 27 Mei 2019, Otoritas Pajak menerbitkan surat putusan atas keberatan Perusahaan, dimana Otoritas Pajak mengabulkan semua keberatan Perusahaan dan menambah jumlah kelebihan bayar untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2016. Pada bulan April dan Juli 2019, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp151,7 miliar dan senilai Rp1,9 juta telah dikompensasikan ke PPh Pasal 21 untuk beberapa masa pajak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2017

Pada tanggal 6 November 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2017.

Pada tanggal 13 dan 14 November 2019, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp294,4 miliar dari pengajuan lebih bayar senilai Rp294,5 miliar, SKPLB PPN senilai Rp746,9 miliar dari pengajuan lebih bayar senilai Rp748,3 miliar, dan SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp1,8 miliar (termasuk denda Rp0,5 miliar). Perusahaan setuju atas koreksi pajak senilai Rp1,5 miliar yang terdiri atas PPh Badan senilai Rp0,1 miliar dan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan senilai Rp1,4 miliar. Selanjutnya, Perusahaan menerima STP dan SKPKB atas PPN WAPU masing-masing senilai Rp1,2 miliar dan Rp957 juta (termasuk denda Rp0,3 miliar). Pada tanggal 14 November 2019, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") untuk PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 (2). Pada tanggal 23 dan 24 Januari 2020, Perusahaan telah menerima restitusi PPN senilai Rp746,9 miliar serta PPh Badan senilai Rp292,3 miliar dan senilai Rp2,1 miliar telah dikompensasikan ke SKPKB dan STP PPN WAPU.

PPH tahun 2018

Pada tanggal 17 Februari 2020, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2018. Pada tanggal 25 Februari 2020, Perusahaan telah menerima pengembalian pendahuluan atas restitusi PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018 senilai Rp979,1 miliar dan senilai Rp30,3 miliar dikompensasikan ke SKPKB PPh Badan dan pajak penghasilan tahun pajak 2012. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses pemeriksaan pajak masih berlangsung.

(ii) Telkomsel

PPH dan PPN Tahun 2006

Pada bulan Desember 2013, Pengadilan Pajak telah menerima banding Telkomsel atas PPN dan PPh tahun 2006 senilai Rp116 miliar.

Pada bulan Februari 2014, Telkomsel menerima pengembalian pajak.

Pada tanggal 3 Juli 2015, dalam hal menanggapi surat Telkomsel untuk klaim pendapatan bunga atas putusan PPN dan PPh untuk tahun 2006, Otoritas pajak menginformasikan bahwa klaim tersebut tidak bisa dikabulkan. Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 19 Agustus 2016, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas PPN senilai Rp108 miliar. Telkomsel mengajukan memorandum peninjauan kembali dan telah dikirim pada tanggal 14 September 2016.

Pada bulan April 2017, Otoritas Pajak telah mengabulkan klaim Telkomsel atas pendapatan bunga yang akan dikompensasikan ke pembayaran cicilan PPh Badan untuk periode April 2017.

Pada bulan Juli 2018, Telkomsel menerima keputusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali Otoritas Pajak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2010

Pada bulan Mei dan Juni 2012, Telkomsel menerima pengembalian denda atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk tahun 2010 senilai Rp15,7 miliar berdasarkan putusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 17 Juli 2012, Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 14 September 2012, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 24 Mei 2012, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN senilai Rp290,6 miliar (termasuk denda Rp67 miliar) untuk tahun 2010 dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak.

Pada tanggal 2 Mei 2016, Telkomsel menerima surat pemberitahuan bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali atas kurang bayar PPN tahun 2010 senilai Rp290,6 miliar. Pada tanggal 27 Mei 2016, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali. Pada bulan Juli 2016, Telkomsel mengakui denda pajak senilai Rp15,7 miliar sebagai beban.

Pada tanggal 9 Mei 2017, Telkomsel menerima keputusan dari Mahkamah Agung yang menolak banding Telkomsel, sehingga atas kurang bayar PPN tersebut telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Juli 2017. Pada tanggal 19 Juli 2017, Telkomsel mengajukan peninjauan kembali tahap kedua atas keputusan Mahkamah Agung.

Pada tanggal 8 Agustus 2018, Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan banding Telkomsel.

Pada tanggal 18 Februari 2019, Telkomsel menerima Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali ("SP2PK") dari Kantor Pajak terkait PPN tahun fiskal 2010 senilai Rp290,6 miliar. Pada tanggal 25 Maret 2019, Telkomsel menerima pembayaran SP2PK dari Kantor Pajak terkait PPN untuk tahun 2010 senilai Rp290,6 miliar.

PPH dan PPN Tahun 2011

Pada tanggal 15 Februari 2016, Telkomsel mengajukan banding kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPh Badan senilai Rp250 miliar (termasuk denda Rp81,1 miliar). Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2016, Telkomsel juga mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPN senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta).

Pada tanggal 6 Februari 2017, Telkomsel menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas PPN senilai Rp1,2 miliar yang mendukung Telkomsel. Selanjutnya, Telkomsel menerima restitusi pajak di bulan Maret dan Juni 2017. Pada tanggal 2 Maret 2017, Telkomsel menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPh Badan yang menerima sebagian dari banding Telkomsel senilai Rp247,6 miliar dan mencatatnya sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 31 Agustus 2017, Telkomsel menerima restitusi pajak. Di bulan Juli dan Oktober 2017, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali atas kurang bayar PPh Badan dan PPN masing-masing senilai Rp62 miliar dan Rp1,2 miliar. Atas hal ini, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali di bulan Agustus dan November 2017.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Telkomsel telah menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung secara parsial, dimana Mahkamah Agung menolak permintaan Otoritas Pajak berkaitan dengan PPN senilai Rp1,1 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2011 (lanjutan)

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Telkomsel mengirimkan surat kepada Pengadilan Pajak untuk meminta keputusan resmi terkait kasus PPN tahun 2011 yang mendukung Telkomsel sebagaimana yang telah diumumkan oleh Mahkamah Agung. Pada bulan Oktober 2019, Telkomsel telah menerima keputusan dari Mahkamah Agung yang menolak permintaan Otoritas Pajak atas PPh Badan senilai Rp62 miliar.

PPH dan PPN Tahun 2014

Pada tanggal 31 Mei 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2014 senilai Rp150,6 miliar (termasuk denda Rp54,6 miliar). Telkomsel menerima atas bagian senilai Rp16,5 miliar dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Juni 2019 dan dicatat sebagai beban lain-lain. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Telkomsel telah membayar sebesar Rp99,1 miliar dan mencatat sebagai tagihan restitusi pajak. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp134,1 miliar.

Pada tanggal 15 Juli dan 22 Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menerima sebesar Rp27,2 miliar dan menolak keberatan sebesar Rp106,8 miliar. Pada tanggal 27 Agustus 2020, Telkomsel menerima sebagian restitusi pajak sebesar Rp27,2 miliar.

Pada tanggal 28 September 2020, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN 2014. Sampai dengan tanggal persetujuan dan otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding masih dalam proses.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2015 senilai Rp384,8 miliar (termasuk denda Rp128,6 miliar) dan telah dibayar penuh pada tanggal 28 Agustus 2019. Atas nilai tagihan sebesar Rp34,6 miliar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dan saldo tersisa senilai Rp350,2 miliar dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 24 September 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp350,2 miliar.

Pada tanggal 13 Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menolak semua keberatan Perusahaan.

PPH dan PPN Tahun 2018

Pada tanggal 20 Februari 2020, Telkomsel menerima surat perintah pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2018. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	Dampak penerapan standar baru	(Dibebankan) Dikreditkan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	30 September 2020
Perusahaan						
Aset pajak tangguhan:						
Provisi penurunan nilai piutang	760	46	21	-	-	827
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	837	-	(139)	-	-	698
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	427	-	15	-	-	442
Provisi imbalan karyawan	230	-	(36)	-	-	194
Pendapatan instalasi tangguhan	92	-	24	-	-	116
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	19	-	3	-	-	22
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	75	(133)	31	-	-	(27)
Jumlah aset pajak tangguhan	2.440	(87)	(81)	-	-	2.272
Liabilitas pajak tangguhan:						
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	2	-	-	(9)
Sewa pembiayaan	(5)	-	1	-	-	(4)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(16)	-	3	-	-	(13)
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	2.424	(87)	(78)	-	-	2.259
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	474	-	117	-	125	716
Aset pajak tangguhan - bersih	2.898	(87)	39	-	125	2.975
Telkomsel						
Aset pajak tangguhan:						
Provisi imbalan karyawan	865	-	(79)	-	-	786
Provisi penurunan nilai piutang	259	-	(8)	-	-	251
Liabilitas kontrak	-	9	(9)	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	-	100	2	-	-	102
Jumlah aset pajak tangguhan	1.124	109	(94)	-	-	1.139
Liabilitas pajak tangguhan:						
Sewa pembiayaan	(1.099)	-	(6)	-	-	(1.105)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(557)	-	594	-	-	37
Amortisasi lisensi	(151)	-	27	-	-	(124)
Biaya kontrak	-	(27)	26	-	-	(1)
Instrumen keuangan lainnya	-	(59)	7	-	-	(52)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.807)	(86)	648	-	-	(1.245)
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(683)	23	554	-	-	(106)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(547)	(64)	(18)	-	(14)	(643)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(1.230)	(41)	536	-	(14)	(749)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2018	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2019
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	663	(70)	244	-	837
Provisi penurunan nilai piutang	632	128	-	-	760
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	420	7	-	-	427
Provisi imbalan karyawan	215	15	-	-	230
Pendapatan instalasi tangguhan	92	0	-	-	92
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	79	(4)	-	-	75
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	9	10	-	-	19
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.110</u>	<u>86</u>	<u>244</u>	<u>-</u>	<u>2.440</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	-	-	(11)
Sewa pembiayaan	(1)	(4)	-	-	(5)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(12)</u>	<u>(4)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(16)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>2.098</u>	<u>82</u>	<u>244</u>	<u>-</u>	<u>2.424</u>
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>406</u>	<u>152</u>	<u>10</u>	<u>(94)</u>	<u>474</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>2.504</u>	<u>234</u>	<u>254</u>	<u>(94)</u>	<u>2.898</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	641	83	141	-	865
Provisi penurunan nilai piutang	270	(11)	-	-	259
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>911</u>	<u>72</u>	<u>141</u>	<u>-</u>	<u>1.124</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(896)	(203)	-	-	(1,099)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(616)	68	-	(9)	(557)
Amortisasi lisensi	(118)	(33)	-	-	(151)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.630)</u>	<u>(168)</u>	<u>-</u>	<u>(9)</u>	<u>(1.807)</u>
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	<u>(719)</u>	<u>(96)</u>	<u>141</u>	<u>(9)</u>	<u>(683)</u>
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>(533)</u>	<u>165</u>	<u>16</u>	<u>(195)</u>	<u>(547)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(1.252)</u>	<u>69</u>	<u>157</u>	<u>(204)</u>	<u>(1.230)</u>

Pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp28.047 miliar dan Rp29.731 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Tahun 2018 dan 2019, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015, serta PMK No. 238/PMK.03/2008. Berdasarkan hal tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 20%.

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anaknya dalam negeri menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Otoritas Pajak dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No. 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana telah diubah terakhir oleh PMK No. 34/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan ditetapkan sebagai PKP Beresiko Rendah melalui Keputusan DJP No.KEP-00080/WPJ.19/KP.04/2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 tanggal 12 April 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 117/PMK.03/2019 tanggal 6 Agustus 2019, maka Perusahaan dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

29. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp16.679 miliar dan Rp16.459 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama tahun berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp168,37 dan Rp166,15 (dalam jumlah penuh) untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 133 tertanggal 24 Mei 2019, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas spesial untuk tahun buku 2018 masing-masing sebesar Rp10.819 miliar (Rp109,22 per lembar saham) dan Rp5.410 miliar (Rp54,61 per lembar saham).

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 31 tertanggal 19 Juni 2020, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas spesial untuk tahun buku 2019 masing-masing sebesar Rp11.197 miliar (Rp113,04 per lembar saham) dan Rp4.065 miliar (Rp41,03 per lembar saham).

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	2.549	2.338
Manfaat tambahan	31a.i.a.ii	0	-
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	1.163	1.479
Telkomsel	31a.ii	2.502	2.209
Telkomsat		-	0
MD Media		-	0
Infomedia		-	0
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		<u>6.214</u>	<u>6.026</u>
Imbalan kesehatan pasca kerja	31b	1.210	996
Imbalan pasca kerja lainnya	31c	313	366
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	31d	785	690
Jumlah		<u>8.522</u>	<u>8.078</u>

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	446	292
Manfaat tambahan	31a.i.a.ii	-	0
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	88	122
Telkomsel	31a.ii	315	241
Beban pensiun berkala, bersih	25	<u>849</u>	<u>655</u>
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih	25,31b	214	153
Beban imbalan pasca kerja lainnya	25,31c	18	24
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	25,31d	107	110
Jumlah		<u>1.188</u>	<u>942</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

a. *Funded*

i. Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur didalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan peserta.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Dapen untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp159 miliar dan Rp233 miliar.

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki. Perusahaan memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perusahaan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	22.061	20.121
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	195	259
Beban bunga	1.158	1.599
Beban bunga <i>One Time Payment</i>	80	-
Kontribusi peserta program pensiun	21	33
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(1.624)	1.514
Pembayaran pensiun	(1.148)	(1.465)
Pembayaran oleh Perusahaan	(80)	-
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>20.663</u>	<u>22.061</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	19.723	19.064
Pendapatan bunga	1.037	1.524
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(1.624)	398
Kontribusi pemberi kerja	159	233
Kontribusi peserta program pensiun	21	32
Pembayaran pensiun	(1.148)	(1.465)
Penyisihan manfaat tambahan	-	-
Beban administrasi program	(54)	(63)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	18.114	19.723
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	2.549	2.338

Pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019, aset program terdiri dari:

	<u>30 September 2020</u>		<u>31 Desember 2019</u>	
	<u>Harga kuotasian di pasar aktif</u>	<u>Tidak memiliki harga kuotasian</u>	<u>Harga kuotasian di pasar aktif</u>	<u>Tidak memiliki harga kuotasian</u>
Kas dan setara kas	578	-	521	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.137	-	1.735	-
Barang konsumen	847	-	1.085	-
Infrastruktur, peralatan dan transportasi	419	-	540	-
Konstruksi, properti dan real estat	188	-	210	-
Industri dasar dan bahan kimia	213	-	135	-
Perdagangan, jasa dan investasi	259	-	395	-
Tambang	138	-	159	-
Agrikultur	52	-	70	-
Industri lainnya	183	-	292	-
Reksadana berbasis saham	568	-	1.027	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	6.097	-	6.077
Obligasi pemerintah	6.560	-	6.493	-
Reksadana	-	2	85	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	374	-	374
Properti	-	174	-	186
Lainnya	-	-	-	339
Jumlah	11.142	6.647	12.747	6.976

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Aset program pensiun termasuk didalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp264 miliar dan Rp346 miliar, yang mewakili 1,46% dan 1,75% dari total aset program pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp337 miliar dan Rp341 miliar mewakili masing-masing 1,86% dan 1,73% dari total aset per tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp(641) miliar dan Rp1.858 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen diatas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 30 September 2020, RKD Dapen dibawah 105% sehingga Perusahaan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen, Perusahaan memberikan manfaat lain berupa manfaat tambahan di tahun 2017 sebesar Rp4,5 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002 dan Rp2,25 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sejak akhir bulan Juni 2002 sampai dengan akhir April 2017.

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (beban manfaat pensiun dibayar di muka) pada awal tahun	2.338	1.057
Beban pensiun berkala bersih	446	398
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	4	-
Kontribusi pemberi kerja	(159)	(233)
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(1.624)	1.514
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	1.624	(398)
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(80)	-
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>2.549</u>	<u>2.338</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban jasa	195	194
Beban administrasi program	54	53
Beban bunga bersih	121	57
Beban <i>One Time Payment</i>	80	-
Beban pensiun berkala bersih	450	304
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(4)	(12)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	<u>446</u>	<u>292</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan	1.624	284
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(1.624)	(284)
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pada laporan masing-masing tertanggal 20 April 2020 dan 1 April 2019 yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tingkat diskonto	7,25%	8,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

ii. Manfaat tambahan

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen, Perusahaan membentuk dana manfaat tambahan yang bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan Rasio Kecukupan Dana ("RKD") diatas 105% dan tingkat pengembalian investasi diatas suku bunga aktuarial untuk pendanaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan (lanjutan)

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	-	104
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	-	9
Laba aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	0	(17)
Pembayaran pensiun	-	(96)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	0	-
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	5	98
Pendapatan bunga dari aset	0	8
Penyisihan manfaat tambahan	-	-
Pengembalian atas aset program pensiun	0	(5)
Pembayaran manfaat pensiun	-	(96)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	5	5
(Surplus) defisit pada program	5	(5)
Perubahan dampak batas atas yang tidak termasuk dalam bunga	(5)	5
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	-	-

Pada tanggal 30 September 2020 belum terdapat aset program manfaat tambahan. Aset program baru akan dicatat sesuai dengan cadangan dana manfaat tambahan yang akan ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Perubahan liabilitas manfaat tambahan pensiun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Liabilitas manfaat tambahan pensiun pada awal tahun	-	6
Beban pensiun berkala bersih	0	1
Penyisihan manfaat tambahan	-	-
Laba aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	0	(12)
Pengembalian aset program pensiun	0	5
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	0	-

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan (lanjutan)

Jumlah beban yang diakui pada laporan laba rugi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil.

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat tambahan dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pada laporan masing-masing tertanggal 20 April 2020 dan 1 April 2019 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Tingkat pengembalian investasi	9,00%-9,50%	9,30%-10,00%
Tingkat diskonto	7,25%	8,25%
Tingkat suku bunga aktuarial pendanaan	9,25%-9,50%	9,25%-9,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2.011

b. *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp32 miliar dan Rp55 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan *uniformulation* bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan *uniformulation* dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Sejak tahun 2012, Perusahaan memberlakukan ketentuan baru MPP yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 April 2012, dimana karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan apabila tidak mengajukan MPP, maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk periode sembilan bulan terakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	1.479	1.830
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	21	29
Beban bunga bersih	67	134
(Laba) rugi aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	94
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(404)	(608)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir periode	<u>1.163</u>	<u>1.479</u>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode sembilan bulan terakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban jasa	21	22
Beban bunga bersih	67	100
Jumlah	<u>88</u>	<u>122</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan terakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pada laporan masing-masing tertanggal 20 April 2020 dan 1 April 2019 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tingkat diskonto	6,50%-7,25%	8,00%-8,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya Rp22 miliar dan Rp207 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	3.738	2.734
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	184	187
Beban bunga	231	224
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	614
Pembayaran pensiun	-	(21)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>4.153</u>	<u>3.738</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	1.529	1.193
Pendapatan bunga	100	97
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	53
Kontribusi pemberi kerja	22	207
Pembayaran pensiun	-	(21)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	<u>1.651</u>	<u>1.529</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>2.502</u>	<u>2.209</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

	30 September 2020	31 Desember 2019
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	2.209	1.541
Beban manfaat pensiun	315	314
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	614
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(53)
Kontribusi pemberi kerja	(22)	(207)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	2.502	2.209

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban jasa	184	140
Beban bunga bersih	131	101
Jumlah	315	241

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dengan laporan tertanggal masing-masing 28 Februari 2020 dan 14 Februari 2019 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Tingkat diskonto	7,50%	8,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Telkom ("Yakes Telkom").

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes Telkom untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	13.823	12.423
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	813	1.062
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(1.074)	905
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(419)	(567)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	13.143	13.823
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	12.827	12.228
Pendapatan bunga	753	1.045
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(1.074)	271
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(419)	(567)
Beban administrasi program	(154)	(150)
Nilai wajar aset program pada akhir periode	11.933	12.827
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	1.210	996

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019, aset program terdiri dari:

	30 September 2020		31 Desember 2019	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	1.104	-	563	-
Saham publik:				
Manufaktur dan konsumen	728	-	706	-
Industri keuangan	892	-	954	-
Konstruksi	119	-	181	-
Infrastruktur dan telekomunikasi	261	-	317	-
Grosir	149	-	159	-
Tambang	98	-	117	-
Industri lainnya:				
Jasa	82	-	75	-
Agrikultur	34	-	49	-
Bioteknologi dan industri farmasi	66	-	96	-
Lainnya	1	-	3	-
Reksadana berbasis ekuitas	404	-	1.202	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	7.609	-	8.071	-
Lainnya	-	-	-	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	368	-	334
Jumlah	11.547	368	12.493	334

Aset program Yakes juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp188 miliar dan Rp222 miliar yang merupakan 1,58% dan 1,73% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp(475) miliar dan Rp1.166 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

	30 September 2020	31 Desember 2019
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	996	195
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala (Laba) rugi aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	214	167
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(1.074)	905
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	1.074	(271)
	1.210	996

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban administrasi program	154	140
Beban bunga bersih	60	13
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja	<u>214</u>	<u>153</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan	1.074	343
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	<u>(1.074)</u>	<u>(343)</u>
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 pada laporan masing-masing tertanggal 20 April 2020 dan 1 April 2019 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tingkat diskonto	8,00%	8,75%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2019	2018
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir ("BFPT") dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti ("BPP").

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal tahun	365	419
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	3	4
Beban bunga bersih	15	29
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	15
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(70)	(101)
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir periode	<u>313</u>	<u>366</u>

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban jasa	3	3
Beban bunga bersih	15	21
Jumlah	<u>18</u>	<u>24</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pada laporan masing-masing tertanggal 20 April 2020 dan 1 April 2019 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tingkat diskonto	6,25%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

d. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp785 miliar dan Rp690 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp107 miliar dan Rp110 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 (Catatan 25).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

e. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk 2020 adalah sebagai berikut (dalam miliaran Rupiah):

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat					
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
	Funded		Unfunded			
Manfaat pasti	Manfaat tambahan					
30 September 2020						
Dalam 10 tahun kedepan	17.627	-	1.308	3.464	5.784	372
Dalam 10-20 tahun	21.855	-	125	9.420	8.001	68
Dalam 20-30 tahun	20.154	-	52	7.150	7.501	38
Dalam 30-40 tahun	15.351	-	18	1.267	4.123	3
Dalam 40-50 tahun	4.265	-	-	-	958	-
Dalam 50-60 tahun	468	-	-	-	42	-
Dalam 60-70 tahun	32	-	-	-	0	-
Dalam 70-80 tahun	0	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,16 tahun	10,16 tahun	4,69 tahun	10,44 tahun	15,47 tahun	3,65 tahun
31 Desember 2019						
Dalam 10 tahun kedepan	18.392	-	1.587	3.486	6.064	418
Dalam 10-20 tahun	21.855	-	125	9.420	8.001	68
Dalam 20-30 tahun	20.154	-	52	7.150	7.501	38
Dalam 30-40 tahun	15.351	-	18	1.267	4.123	3
Dalam 40-50 tahun	4.265	-	-	-	958	-
Dalam 50-60 tahun	468	-	-	-	42	-
Dalam 60-70 tahun	32	-	-	-	0	-
Dalam 70-80 tahun	0	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,16 tahun	10,16 tahun	4,69 tahun	10,44 tahun	13,34 tahun	3,64 tahun

f. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak pada 30 September 2020 atas liabilitas manfaat pasti sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
30 September 2020				
Sensitivitas				
Didanai:				
Manfaat pasti	(1.821)	2.253	240	(256)
Manfaat tambahan	-	-	-	-
Tidak didanai	(37)	29	31	(40)
Telkomsel	(762)	863	433	(407)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.447)	1.762	1.894	(1.576)
Imbalan pasca kerja lainnya	(11)	12	-	-
31 Desember 2019				
Sensitivitas				
Didanai:				
Manfaat pasti	(1.952)	2.416	257	(275)
Manfaat tambahan	-	-	-	-
Tidak didanai	(40)	33	34	(43)
Telkomsel	(686)	777	390	(366)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.551)	1.888	2.030	(1.689)
Imbalan pasca kerja lainnya	(12)	13	-	-

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. PENSUNAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

f. Analisis sensitivitas (lanjutan)

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut diatas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

32. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan *Long Service Leaves* (“LSL”). LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp1.124 miliar dan Rp1.066 miliar masing-masing pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp128 miliar dan Rp115 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 (Catatan 25).

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Hubungan</u>	<u>Sifat Saldo Akun/ Transaksi</u>
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasional dan perbaikan, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”)	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bank milik negara Bank Mandiri	Entitas sepengendali Entitas sepengendali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BNI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Hubungan</u>	<u>Sifat Saldo Akun/ Transaksi</u>
BRI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BTN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan penghasilan pendanaan
PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Kimia Farma (Persero) ("Kimia Farma")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Taspen (Persero) ("Taspen")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Garuda Indonesia (Persero) ("Garuda Indonesia")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sepengendali	Beban asuransi aset tetap
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sepengendali	Beban listrik
Bahana TCW	Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual dan obligasi
PT Sarana Multi Infrastruktur	Entitas sepengendali	Biaya pendanaan
Tiphone	Entitas asosiasi	Distribusi kartu SIM dan voucher prabayar
Indonusa	Entitas asosiasi	Beban TV berbayar
Finarya	Entitas asosiasi	Beban pemasaran
Teltranet	Entitas asosiasi	Beban CPE
Yakes	Entitas berelasi lainnya	Beban pengobatan
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban jasa penagihan, beban jasa-jasa lainnya, distribusi kartu SIM dan voucher prabayar, dan pembelian aset tetap
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa jaringan, beban operasi dan pemeliharaan, pembelian aset tetap dan jasa konstruksi, dan distribusi kartu SIM dan voucher prabayar
Direksi	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Komisaris	Personil pengawas	Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 30 September 2020, Grup mencatat adanya penambahan nilai provisi yang diakui selama periode berjalan dari pihak berelasi sebesar Rp350 miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	160	0,16	147	0,14
Entitas sepengendali				
Indosat	785	0,79	678	0,66
BRI	450	0,45	434	0,42
BNI	432	0,43	124	0,12
Pertamina	259	0,26	117	0,11
Bank Mandiri	150	0,15	114	0,11
BTN	144	0,14	191	0,19
Pegadaian	103	0,10	152	0,15
Kimia Farma	94	0,09	81	0,08
Taspen	81	0,08	60	0,06
Garuda Indonesia	76	0,08	89	0,09
Lain-lain	758	0,76	794	0,77
Sub-jumlah	3.332	3,33	2.834	2,76
Entitas berelasi lainnya	381	0,38	40	0,04
Entitas asosiasi	37	0,04	47	0,05
Jumlah	3.910	3,91	3.068	2,99

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Entitas sepengendali				
PLN	2.143	3,18	1.351	1,93
Indosat	412	0,61	529	0,76
Jasindo	80	0,12	91	0,13
Lain-lain	109	0,16	93	0,13
Sub-jumlah	2.744	4,07	2.064	2,95
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	742	1,10	706	1,01
Yakes	110	0,16	97	0,14
Lain-lain	76	0,11	1.753	2,50
Sub-jumlah	928	1,37	2.556	3,65
Entitas asosiasi				
Indonusa	290	0,43	303	0,43
Finarya	123	0,18	-	-
Teltranet	80	0,12	123	0,18
Lain-lain	52	0,08	2	0,00
Sub-jumlah	545	0,81	428	0,61
Jumlah	4.217	6,25	5.048	7,21

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
Penghasilan pendanaan				
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	457	70,96	590	66,89
Lain-lain	-	-	1	0,11
Jumlah	457	70,96	591	67,00

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
Biaya pendanaan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	20	0,58	26	0,81
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	771	22,30	870	27,03
Sarana Multi Infrastruktur	226	6,54	104	3,23
Jumlah	1.017	29,42	1.000	31,07

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
Pembelian aset tetap (Catatan 11)				
Entitas sepengendali	45	0,25	43	0,19
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	91	0,51	80	0,36
Lain-lain	66	0,37	87	0,39
	157	0,88	167	0,75
Jumlah	202	1,13	210	0,94

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Distribusi kartu SIM dan voucher				
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	4.339	4,34	3.477	3,39
Tiphone	1.547	1,55	4.345	4,23
Gratika	344	0,34	470	0,46
Jumlah	6.230	6,23	8.292	8,08

c. Saldo akun dengan pihak berelasi

	30 September 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
Kas dan setara kas (Catatan 3)	13.295	5,70	13.315	6,02
Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	154	0,07	71	0,03
Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	1.151	0,49	1.792	0,81
Aset lancar lainnya	179	0,08	111	0,05
Aset tidak lancar lainnya	31	0,01	31	0,01

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Saldo akun dengan pihak berelasi (lanjutan)

	30 September 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
Utang usaha (Catatan 15)				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	24	0,02	5	0,00
Entitas sependengali				
Indosat	133	0,12	68	0,07
BUMN	72	0,06	206	0,20
Lain-lain	10	0,01	-	-
Sub-jumlah	215	0,19	274	0,27
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	189	0,16	269	0,26
Lain-lain	390	0,34	271	0,26
Sub-jumlah	579	0,50	540	0,52
Jumlah	818	0,71	819	0,79
Beban yang masih harus dibayar				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	9	0,01	6	0,01
Entitas sependengali				
BUMN	97	0,08	88	0,09
Bank milik negara	53	0,05	75	0,07
Sub-jumlah	150	0,13	163	0,16
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	59	0,05	188	0,18
Lain-lain	25	0,02	15	0,01
Jumlah	243	0,21	372	0,36
Uang muka pelanggan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	20	0,02	19	0,02
Entitas sependengali				
PLN	7	0,01	6	0,01
Jumlah	27	0,03	25	0,03
Utang bank jangka pendek (Catatan 18)	3.940	3,42	3.655	3,52
Pinjaman penerusan (Catatan 19a)	657	0,57	736	0,71
Utang bank jangka panjang (Catatan 19c)	17.886	15,51	15.319	14,74
Pinjaman lainnya (Catatan 19d)	3.754	3,26	3.740	3,60

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 19a).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

ii. Indosat (lanjutan)

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat *Multimedia Mobile* serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif di tahun berjalan dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh ("SLJJ"), dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkuit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan PT Aplikanusa Lintasarta ("*Lintasarta*"). Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

Dayamitra menandatangani SPA dengan Indosat terkait pembelian menara milik Indosat. Selain itu, disepakati juga penyewaan kembali oleh Indosat atas menara telekomunikasi yang diakuisisi oleh Dayamitra yang ditandai dengan penandatanganan MTLA (Catatan 1e).

iii. Lain-lain

Kisel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, percetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan voucher pulsa isi ulang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	167	0,25%	185	0,26%
Dewan Komisaris	71	0,11%	84	0,12%

Jumlah yang disajikan pada tabel diatas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

34. SEGMENT OPERASI

Grup memiliki empat segmen utama yang dilaporkan, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise*, dan *WIB*. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, *SMS*, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa Indihome (terdiri dari jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, dan internet), dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen *WIB* menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkit, satelit, *VSAT*, *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke operator telekomunikasi lainnya dan pelanggan internasional. Segmen lain-lain merupakan segmen *digital services* yang tidak memenuhi persyaratan pengungkapan dari laporan segmen ini. Tidak terdapat segmen operasi yang digabungkan dalam menentukan laporan segmen.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai yang dipercaya manajemen untuk merepresentasikan nilai pasar.

	2020					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	62.603	15.206	11.465	10.233	154	99.661	280	99.941
Pendapatan antar segmen	2.478	678	14.569	11.939	1.073	30.737	(30.737)	-
Jumlah pendapatan segmen	65.081	15.884	26.034	22.172	1.227	130.398	(30.457)	99.941
Beban segmen								
Beban segmen	(41.201)	(12.381)	(27.157)	(17.176)	(1.195)	(99.110)	32.180	(66.930)
Hasil segmen	23.880	3.503	(1.123)	4.996	32	31.288	1.723	33.011
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(7.058)	(5.536)	(2.691)	(2.449)	(9)	(17.743)	(179)	(17.922)
Penyusutan dan amortisasi	(12.340)	(2.766)	(2.359)	(3.421)	(18)	(20.904)	(134)	(21.038)
Provisi diakui selama periode berjalan	(51)	(434)	(694)	(35)	(2)	(1.216)	(28)	(1.244)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	2019					Total segmen	Penyesuaian dan eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	65.983	13.249	14.921	8.191	213	102.557	74	102.631
Pendapatan antar segmen	2.305	487	14.352	11.755	928	29.827	(29.827)	-
Jumlah pendapatan segmen	68.288	13.736	29.273	19.946	1.141	132.384	(29.753)	102.631
Beban segmen	(42.672)	(11.784)	(28.669)	(14.468)	(1.189)	(98.782)	29.605	(69.177)
Hasil segmen	25.616	1.952	604	5.478	(48)	33.602	(148)	33.454
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(9.341)	(6.518)	(3.802)	(2.200)	(14)	(21.875)	(324)	(22.199)
Penyusutan dan amortisasi	(10.385)	(2.636)	(1.972)	(2.303)	(11)	(17.307)	48	(17.259)
Provisi diakui selama periode berjalan	(463)	(480)	(861)	(76)	(0)	(1.880)	(19)	(1.899)

Penyesuaian dan eliminasi:

	2020	2019
Hasil segmen	31.288	33.602
Rugi usaha unit bisnis	(627)	(405)
Eliminasi dan penyesuaian lainnya	2.349	257
Laba usaha konsolidasi	33.011	33.454

Informasi geografis:

Informasi pendapatan di bawah berdasarkan lokasi unit bisnis.

	2020	2019
Pendapatan eksternal		
Indonesia	94.941	99.186
Luar negeri	5.000	3.445
Jumlah	99.941	102.631

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

	30 September 2020	31 Desember 2019
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	159.382	159.811
Luar negeri	3.961	3.608
Jumlah	163.343	163.419

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- i. Biaya aktivasi
- ii. Biaya berlangganan
- iii. Biaya penggunaan
- iv. Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- i. Tarif jasa teleponi dasar
 - ii. Tarif jelajah, dan/atau
 - iii. Tarif jasa multimedia,
- dengan struktur tarif sebagai berikut:
- i. Biaya aktivasi
 - ii. Biaya berlangganan bulanan
 - iii. Biaya penggunaan
 - iv. Biaya fasilitas tambahan.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi (lanjutan)

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/II/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi, dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah		7.700
Dolar A.S.	34,90	521
HKD	0,53	1
Jumlah		8.222

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan, TII dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Indonesia <i>Global Gateway</i>
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	26 Maret 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Radio IP Backhaul Node-B Telkomsel <i>Platform NEC</i>
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	6 April 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Dual Wavelength Division Multiplexing ("DWDM") Platform Nokia 2018</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	16 Desember 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform ZTE</i>
Perusahaan dan PT Pembangunan Deltamas	19 Desember 2019	Perjanjian Pembelian Tanah di <i>Greenland International Industrial Center (GIIC) - Kota Deltamas</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	23 Desember 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform Huawei</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	27 Desember 2019	Perjanjian pengadaan dan pemasangan VIMS <i>Platform ZTE</i>
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	31 Desember 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan ISP SKKL <i>Platform</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	21 Januari 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OTN SCN <i>Platform Huawei</i>
Perusahaan dan Konsorsium Bisnis Submarine Cable	14 Februari 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) <i>Repeaterless</i> Luwuk - Morowali - Kendari (LUMORI) dan Bali - Lombok (BALOM)
Perusahaan dan Konsorsium Bisnis Submarine Cable	14 Februari 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Labuan Bajo - Raba dan SKKL Gresik - Bawean
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	25 Juni 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OLT <i>Platform Huawei</i>
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Juli 2020	Perjanjian Pengadaan STB <i>Platform ZTE</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	22 Juli 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform Nokia - IPBB</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	24 September 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OLT <i>Platform ZTE</i>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG	17 April 2008	Perjanjian Pembangunan Jaringan Kombinasi 2G dan 3G
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, dan PT Nokia Siemens Networks	17 April 2008	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Online Charging System ("OCS") and Service Control Points ("SCP") System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Technical Support</i> untuk Menyediakan Jasa <i>technical support</i> untuk OCS dan SCP
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	25 Maret 2013	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan <i>Gateway GPRS Support Node ("GGSN") Service Complex</i>
Telkomsel dan Wipro Limited dan PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan <i>OSDSS Solution</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN Service Complex Rollout</i>
Telkomsel, PT NSNI, NSN Oy, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2018	Perjanjian Pengadaan <i>Ultimate Radio Network Infrastructure</i> ROA dan TSA
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia, dan PT Huawei Tech Investment	1 April 2018	Perjanjian untuk Pengadaan Infrastruktur <i>Mobile Network Router</i>
Telkomsel, PT Sigma Solusi Integrasi, Oracle Corporation, dan PT Phincon	5 Juli 2019	Perjanjian Pengadaan, Pengembangan dan Dukungan Teknis untuk <i>Customer Relationship Management ("CRM") System Integrator</i>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan	
				Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
BRI	500	14 Maret 2022	Rp	-	42
BNI	500	31 Maret 2021	Rp	-	211
Bank Mandiri	500	23 Desember 2021	Rp	-	132
Jumlah	1.500				385

- (ii) Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BRI sebesar Rp1.000 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 25 September 2022. Pada tanggal 30 September 2020, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp567 miliar sebagai garansi atas perjanjian pembayaran untuk biaya hak pakai tahunan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan sebesar Rp20 miliar sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 (Catatan 36c.i).

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BCA sebesar Rp150 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020.

Telkomsel juga memiliki fasilitas bank garansi dengan BNI sebesar Rp2.100 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2020. Telkomsel menggunakan fasilitas ini untuk *surety bond* sebesar Rp1.030 miliar sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio 2,3 GHz (Catatan 36c.i).

- (iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta atau setara dengan Rp224 miliar dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui sesuai dengan adendum VIII (kedelapan) pada tanggal 18 Desember 2019 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$25 juta atau setara dengan Rp373 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 23 Desember 2020. Pada tanggal 30 September 2020, TII belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.

- (iv) Pada tanggal 30 September 2020, Sigma memiliki sisa fasilitas bank garansi dari BNI sebesar Rp119 miliar.

c. Lainnya

- (i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tanggal 2 November 2015, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 76 tanggal 15 Desember 2010, Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900 MHz, dan 1800 MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan sejak 2010.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan No. 018/TEL.01.02/2019 Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 dari Menkominfo yang menggantikan Surat Keputusan No. 1987 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

1. Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
2. Layanan telekomunikasi dasar.

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, No. 191 Tahun 2013, No. 509 Tahun 2016, No. 1896 Tahun 2017 dan No. 806 Tahun 2019, Telkomsel diharuskan, antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Mengeluarkan setiap tahunnya *performance bond* sebesar Rp20 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz dan *surety bond* sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz (Catatan 36b.ii).

(ii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2020 hingga 2029. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Sebagai <i>lessor</i>	9.253	1.571	4.499	3.183

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iii) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Selanjutnya, Peraturan Menkominfo No. 17 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 19 tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 4 November 2016. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kontribusi pengembangan KPU berlaku efektif untuk tahun 2016 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, dalam hal penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Program KPU), penyedia dipilih melalui proses seleksi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"). BPPPTI menggantikan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 3 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018, BPPPTI berganti nama menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"). Berikutnya, Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 10 tahun 2018.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No.792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BPPPTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp217 miliar, dan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum pajak) dan tidak terdapat penerimaan tambahan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	30 September 2020			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	256,82	0,71	13,82	4.027
Aset keuangan lancar lainnya	6,47	-	-	97
Piutang usaha				
Pihak berelasi	1,06	-	-	16
Pihak ketiga	212,88	-	8,59	3.302
Piutang lain-lain	0,22	-	0,03	4
Aset lancar lainnya	0,30	-	1,24	23
Aset tidak lancar lainnya	79,97	54,57	9,01	1.317
Jumlah aset	<u>557,72</u>	<u>55,28</u>	<u>32,69</u>	<u>8.786</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,14)	-	-	(2)
Pihak ketiga	(182,46)	(4,41)	(3,27)	(2.770)
Utang lain-lain	(3,92)	-	(3,38)	(109)
Biaya yang masih harus dibayar	(51,19)	(176,95)	(1,55)	(813)
Pinjaman bank jangka pendek	(10,10)	-	-	(150)
Uang muka pelanggan	(0,17)	-	-	(3)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(19,31)	(767,90)	(3,53)	(449)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(52,30)	(2.687,64)	(23,30)	(1.507)
Liabilitas lainnya	(16,04)	-	(0,03)	(239)
Jumlah liabilitas	<u>(335,63)</u>	<u>(3.636,90)</u>	<u>(35,06)</u>	<u>(6.042)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>222,09</u>	<u>(3.581,62)</u>	<u>(2,37)</u>	<u>2.744</u>

	31 Desember 2019			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	178,66	1,18	9,42	2.612
Aset keuangan lancar lainnya	14,18	-	1,74	221
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,12	-	-	2
Pihak ketiga	165,16	-	8,96	2.409
Piutang lain-lain	0,31	-	0,05	5
Aset lancar lainnya	-	-	0,89	12
Aset tidak lancar lainnya	63,29	49,15	12,28	1.044
Jumlah aset	<u>421,72</u>	<u>50,33</u>	<u>33,34</u>	<u>6.305</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,08)	-	-	(1)
Pihak ketiga	(131,14)	(4,25)	(5,23)	(1.869)
Utang lain-lain	(4,17)	-	(13,92)	(251)
Biaya yang masih harus dibayar	(46,57)	(152,56)	(2,02)	(691)
Utang bank jangka pendek	(1,19)	-	-	(16)
Uang muka pelanggan	(0,23)	-	-	(3)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(22,31)	(767,90)	(4,36)	(469)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(71,12)	(3.071,59)	(0,38)	(1.386)
Liabilitas lainnya	(13,94)	-	(0,01)	(194)
Jumlah liabilitas	<u>(290,75)</u>	<u>(3.996,30)</u>	<u>(25,92)</u>	<u>(4.880)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>130,97</u>	<u>(3.945,97)</u>	<u>7,42</u>	<u>1.425</u>

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 30 September 2020 menggunakan kurs tanggal 3 November 2020, kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp52 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

i. Klasifikasi

(a) Aset keuangan

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Kas dan setara kas	-	18.242
Aset keuangan lancar lainnya	-	483
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	-	12.089
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	258
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Penyertaan tersedia untuk dijual	-	1.124
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	17.420	-
Aset keuangan lancar lainnya	309	-
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	12.958	-
Aset kontrak	1.117	-
Aset keuangan tidak lancar lainnya	199	-
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Penyertaan jangka panjang metode ekuitas	761	-
Reksadana	74	-
Penyertaan jangka panjang lainnya	1.291	-
Obligasi konversi	151	-
Jumlah aset keuangan	<u>34.280</u>	<u>32.196</u>

(b) Liabilitas keuangan

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang usaha dan utang lain-lain	15.104	14.346
Beban yang masih harus dibayar	13.684	13.736
Utang bank jangka pendek	9.515	8.705
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	657	736
Obligasi dan wesel bayar	7.469	9.958
Utang bank jangka panjang	26.815	26.605
Utang sewa pembiayaan	-	2.340
Kewajiban sewa	13.558	-
Pinjaman lainnya	3.754	3.740
Jumlah liabilitas keuangan	<u>90.556</u>	<u>80.166</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar

Tabel dibawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan:

30 September 2020	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Reksadana	74	74	74	-	-
Obligasi konversi	151	151	-	-	151
Penyertaan jangka panjang lainnya	1.291	1.291	-	-	1.291
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	657	682	-	-	682
Obligasi dan wesel bayar	7.469	8.332	-	-	-
Utang bank jangka panjang	26.815	26.757	-	-	26.757
Kewajiban sewa	13.558	13.558	-	-	13.558
Pinjaman lainnya	3.754	3.702	-	-	3.702
Jumlah	53.769	54.547	74	-	46.141

31 Desember 2019	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.124	1.124	71	-	1.053
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	736	759	-	-	759
Obligasi dan wesel bayar	9.958	10.897	9.906	-	991
Utang bank jangka panjang	26.605	26.537	-	-	26.537
Utang sewa pembiayaan	2.340	2.340	-	-	2.340
Pinjaman lainnya	3.740	3.709	-	-	3.709
Liabilitas lainnya	194	194	-	-	194
Jumlah	44.697	45.560	9.977	-	35.583

Keuntungan atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 senilai Rp155 miliar. Tidak ada perpindahan antar hirarki nilai wajar selama tahun 2020.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah:

	30 September 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	1.053	734
Penyesuaian saldo awal PSAK 71	282	-
Laba (rugi) yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	158	3
Pembelian/penambahan	342	390
Penjualan/pengurangan	(393)	(74)
Saldo akhir	1.442	1.053

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

iii. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan liabilitas tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (a) Nilai wajar pada laporan laba rugi, sebelumnya sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar dari obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (b) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- (a) Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- (b) Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga pasar, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	30 September 2020		31 Desember 2019	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,56	0,06	0,42	0,05
Liabilitas keuangan	(0,34)	(3,64)	(0,29)	(4,00)
Eksposur bersih	0,22	(3,58)	0,13	(3,95)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 30 September 2020 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	<u>Ekuitas/ laba (rugi)</u>
30 September 2020	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	31
Yen Jepang (penguatan 5%)	(24)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 30 September 2020 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

ii. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 30 September 2020, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

iii. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 18 dan 19). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pinjaman bunga tetap	(31.996)	(23.001)
Pinjaman bunga mengambang	(29.772)	(29.083)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 30 September 2020, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp74,4 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

iv. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Kas dan setara kas	17.420	18.242
Aset keuangan lancar lainnya	383	554
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	12.958	12.089
Aset kontrak	1.117	-
Aset tidak lancar lainnya	199	258
Jumlah	<u>32.077</u>	<u>31.143</u>

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan. Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup.

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 4,15% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 30 September 2020.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

v. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio lancar dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2021	2022	2023	2024	2025 dan selanjutnya
30 September 2020							
Utang usaha dan lain-lain	15.103	(15.104)	(15.104)				
Beban yang masih harus dibayar	13.684	(13.684)	(13.684)				
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	657	(707)	(214)	(74)	(166)	(142)	(111)
Obligasi dan wesel bayar	7.469	(14.243)	(1.241)	(181)	(2.817)	(507)	(9.497)
Utang bank	36.330	(41.280)	(16.269)	(3.479)	(5.990)	(6.095)	(9.447)
Pinjaman lainnya	3.754	(4.384)	(1.330)	(166)	(1.221)	(1.142)	(525)
Kewajiban sewa	13.558	(15.719)	(6.175)	(776)	(2.948)	(2.240)	(3.580)
Jumlah	90.555	(105.121)	(54.017)	(4.676)	(13.142)	(10.126)	(23.160)
31 Desember 2019							
Utang usaha dan lain-lain	14.346	(14.346)	(14.346)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	13.736	(13.736)	(13.736)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	736	(804)	(222)	(196)	(154)	(132)	(100)
Obligasi dan wesel bayar	9.958	(17.454)	(3.402)	(1.231)	(2.817)	(507)	(9.497)
Utang bank	35.310	(40.732)	(15.956)	(8.495)	(4.435)	(6.417)	(5.429)
Pinjaman lainnya	3.740	(4.534)	(926)	(1.082)	(1.010)	(948)	(568)
Utang sewa pembiayaan	2.340	(2.713)	(936)	(785)	(607)	(255)	(130)
Liabilitas lainnya	194	(223)	(12)	(52)	(53)	(53)	(53)
Jumlah	80.360	(94.542)	(49.536)	(11.841)	(9.076)	(8.312)	(15.777)

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	30 September 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	9.515	5,82%	8.705	5,74%
Utang jangka panjang	52.253	31,96%	43.379	28,61%
Total utang	61.768	37,78%	52.084	34,35%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	101.717	62,22%	99.561	65,65%
Jumlah	163.485	100,00%	151.645	100,00%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	30 September 2020	31 Desember 2019
Jumlah utang dengan bunga	61.768	52.084
Dikurangi: kas dan setara kas	(17.420)	(18.242)
Utang bersih	44.348	33.842
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	101.717	99.561
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	43,60%	33,99%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 19, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh kreditur. Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Grup telah mematuhi persyaratan permodalan yang diberikan oleh pihak eksternal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2020 dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

- a. Aktivitas non-kas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	5.754	4.813
Kapitalisasi bunga	89	68
Sewa pembiayaan	-	30
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	316	199
Investasi pada entitas asosiasi melalui:		
Pengalihan aset	-	150

- b. Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2020	Arus kas	Perubahan non tunai				30 September 2020
			Penerapan standar baru	Perubahan valuta asing	Sewa baru	Perubahan lainnya	
Utang bank jangka pendek	8.705	807	-	-	-	3	9.515
Pinjaman penerusan <i>(two step loan)</i>	736	(134)	-	55	-	-	657
Obligasi dan wesel bayar	9.958	(2.491)	-	-	-	2	7.469
Utang bank jangka panjang	26.605	142	-	71	-	(3)	26.815
Pinjaman lainnya	3.740	14	-	-	-	-	3.754
Utang sewa pembiayaan	2.340	-	-	-	-	(2.340)	-
Kewajiban sewa	-	(4.541)	14.318	-	1.613	2.168	13.558
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	52.084	(6.203)	14.318	126	1.613	(170)	61.768

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- Pada tanggal 8 Oktober 2020, Telkomsel melakukan pelunasan pinjaman kepada BNI sebesar Rp575 miliar.
- Pada tanggal 9 Oktober 2020, Metra menjual 49% kepemilikan sahamnya atas ILCS kepada PT Pelabuhan Indonesia II (IPC), sehingga ILCS tidak lagi menjadi entitas asosiasi Group.
- Pada tanggal 16 Oktober 2020, Dayamitra menandatangani dan melakukan penarikan fasilitas kredit dengan DBS, BNI, Sindikasi Bank Mandiri dan BNI, Bank Mandiri serta MUFG, masing-masing sebesar Rp800 miliar, Rp840 miliar, Rp576 miliar, Rp269 miliar dan Rp500 miliar.